

**ARAHAN PENGENDALIAN RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MAMASA DITINJAU DARI KESESUAIAN
LAHAN PERTANIAN**

SKRIPSI

Oleh:

BRIYAN YUDHA OCTA PRATAMA

4518042081



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

**ARAHAN PENGENDALIAN RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MAMASA DITINJAU DARI KESESUAIAN
LAHAN PERTANIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS

BOSOWA

Oleh :

BRIYAN YUDHA OCTA PRATAMA

4518042081

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA'

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2023

SKRIPSI

ARAHAN PENGENDALIAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAMASA DITINJAU DARI KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN

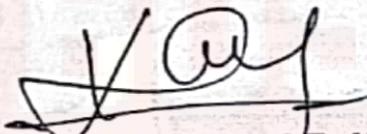
Disusun dan Diajukan Oleh

BRIYAN YUDHA OCTA PRATAMA
NIM 4518 042 081

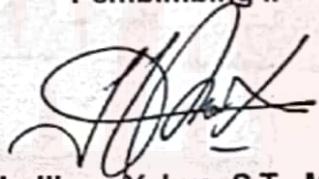
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 27 Januari 2023

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T
NIDN : 09-110774-01

Pembimbing II


Ir. Ilham Yahya, S.T., M.SP
NIDN 09-100481-05

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar


Dr. H. Nasrullah, S.T, M,T
NIDN : 09-090773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota


Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M,T
NIDN : 09-110774-01

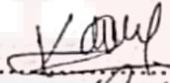
HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.074a/SK/FT/UNIBOS/II/2023 Pada Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Februari 2023
Skripsi Atas Nama : Briyan Yudha Octa Pratama
Nomor Pokok : 4518042081

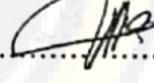
Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. S. Kamran Aksa, S.T, M.T. 

Sekretaris : Ir. Ilham Yahya, S.T., M.SP 

Anggota : 1. Dr. Ir. Muh Fuad Aziz., M.T 

2. Emil Salim Rasyidi, S.T., M.Sc. 

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


Dr. H. Nasrullah, ST., MT.
NIDN : 0908077301

KETUA PROGRAM STUDI
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN : 0911077401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mahasiswa : Briyan Yudha O. Pratama

Stambuk : 45 18 042 081

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengandaan tulisan atau hasil pikiran orang lain. Bila di kemudian hari terjadi atau ditemukan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Penulis


Briyan Yudha Octa Pratama

ABSTRAK

Briyan Yudha Octa Pratama, 2023 “Arahan Pengendalian Ruang Kawasan Perkotaan Mamasa Ditinjau Dari Kesesuaian Lahan Pertanian”. Dibimbing oleh S. Kamran Aksa dan Ilham Yahya.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa dan untuk merumuskan arahan pengendalian ruang di Kawasan Perkotaan Mamasa, ditinjau dari kesesuaian lahan pertanian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *mix method*. untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa menggunakan alat analisis Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian sedangkan untuk merumuskan arahan pengendalian ruang di Kawasan Perkotaan Mamasa, ditinjau dari kesesuaian lahan pertanian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu kesesuaian lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa adalah tanaman setahun dengan luas 1538,36 Ha dan Konsep pengendalian kesesuaian lahan pertanian tanaman setahun ataupun tanaman tahunan dengan peruntukan rencana pola ruang kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, kawasan pertambangan batuan, kawasan industri, kawasan keunikan fosil dan batuan, kawasan pariwisata, budidaya perikanan, dan tanaman nasional yang berstatus Non LP2B diarahkan untuk membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian. Adapun untuk kesesuaian lahan pertanian dengan rencana pola ruang Non Pertanian dengan status LP2B diarahkan agar tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada kawasan ini, sesuai dengan PP No.1 Tahun 2011 dan untuk kawasan perkebunan dan kawasan tanaman pangan diarahkan untuk perlindungan kawasan pertanian dari alih fungsi lahan.

Kata kunci: Arahan, Pengendalian Ruang, Kesesuaian Lahan Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus pencipta alam semesta beserta isinya atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “**Arahan Pengendalian Ruang Kawasan Perkotaan Mamasa Ditinjau Dari Kesesuaian Lahan Pertanian**”.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik, Universitas Bosowa.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda **Lewi, S.Pd, M.Pd, MM.** dan Ibunda **Tabita** yang telah mencurahkan segala cinta dan kasih sayang serta perhatian moril dan materilnya dalam upaya keberhasilan pendidikan penulis. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan berkat di dunia dan akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Batara Surya, M.Si** selaku Rektor Universitas Bosowa
Makassar

2. **Bapak Dr. Ir. H. Nasrullah, ST., MT** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar
3. **Bapak Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar, serta selaku Pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
4. **Bapak Ilham Yahya, S.T, M.SP** selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama duduk di bangku perkuliahan sajak awal sampai selesai.
6. Kepada adik terkasih **Grace Apriani Rara', Leita Achynelly Awang, Jocelyn Elora Lakkean**, serta adinda **Werly Yoris Lakkean (Alm)** yang tercinta terimakasih atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang selalu menjadi kekuatan dan semangat penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Kepada seluruh **Keluarga Besar Kakek/Nenek Ruben Lakkean/Awang** yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

8. Kepada sahabat seperjuangan **“cek toko sebelah”**. **Aprilia Laxsmi Pareang, Ameliya Maghira, S.T, Andika Saputra Hassanuddin, S.T, Anggel Erpa Erong Pakiding, S.T, Yesimiel Pabubung, S.T** dan **Muhammad Islam Darmawan** yang selalu membantu, mendukung memberi semangat serta menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan perkuliahan serta skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman perjuangan **PWK 2018 (PEACE18)**, yang sudah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam proses penulisan serta dalam perkuliahan.
10. Kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan dan isinya. Oleh karena itu, dengan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, 14 November 2022

Briyan Yudha Octa Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABELvii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Ruang Lingkup Pembahasan..... 5

F. Sistematika Pembahasan 5

BAB II KAJIAN TEORI 7

A. Kawasan Penelitian 7

B. Lahan..... 9

C. Lahan Pertanian Berkelanjutan.....15

D. Alih Fungsi Lahan17

E. Alih Fungsi Lahan Pertanian.....21

F. Kemampuan Lahan25

G. Kesesuaian Lahan30

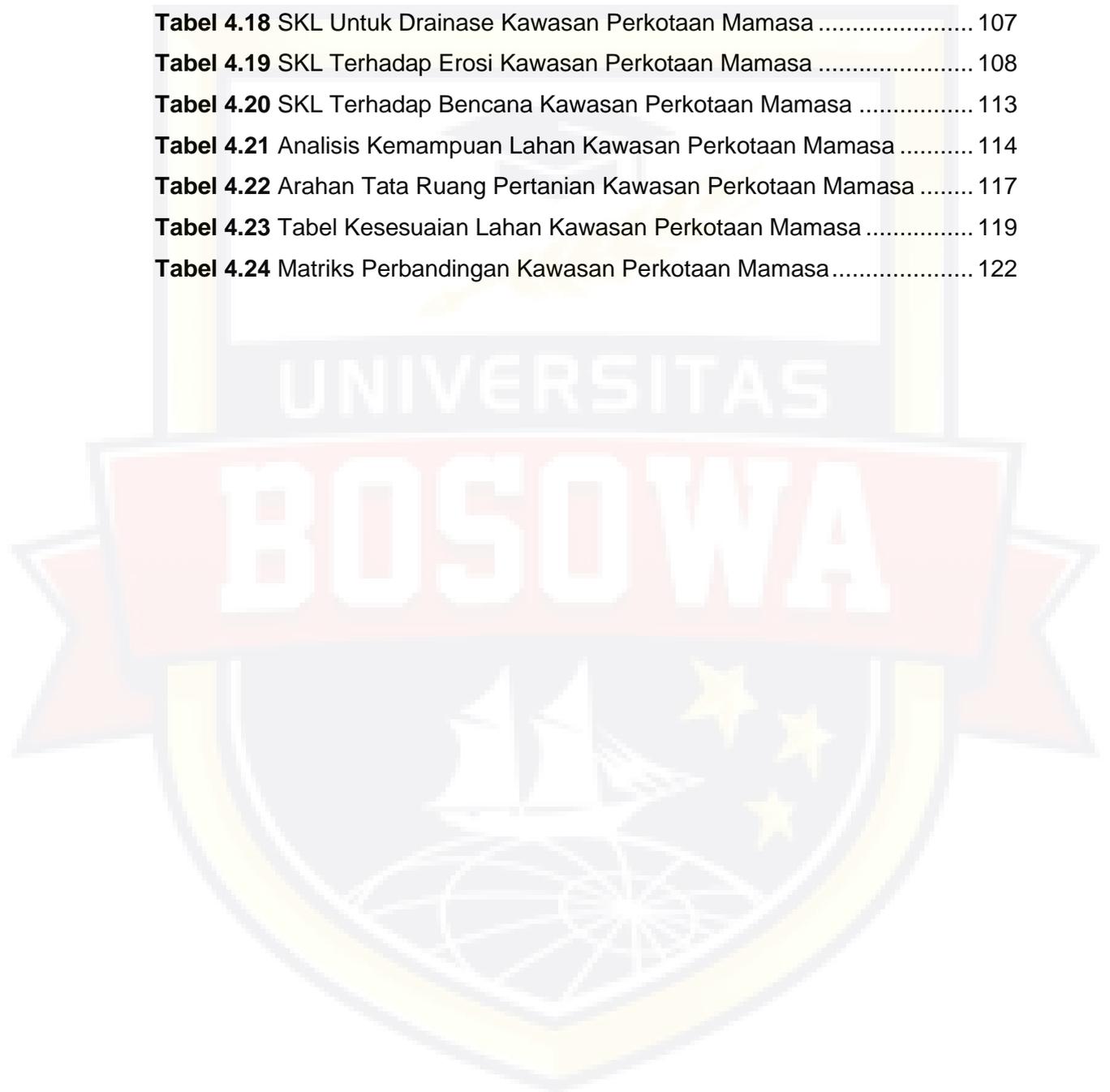
H. Arahan Tata Ruang Wilayah Pertanian	37
I. Penelitian Terdahulu	40
J. Kerangka Berpikir	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	48
1. Jenis Penelitian	48
2. Sumber Data	49
C. Variabel Penelitian	50
D. Metode Pengumpulan Data	52
1. Observasi Lapangan	53
2. Data Spasial	53
3. Data Kebijakan	54
4. Data Statistik	54
5. Metode Dokumentasi.....	55
E. Teknik Analisis Data	56
F. Defenisi Operasional	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambar Umum Kabupaten Mamasa	70
1. Wilayah Administrasi	70
2. Kemiringan Lereng	74
3. Jenis Tanah.....	76
4. Iklim dan Curah Hujan	78
5. Penggunaan Lahan	80
6. Jumlah Penduduk.....	82
7. Kepadatan Penduduk.....	83
B. Gambaran Umum Kawasan Perkotaan Mamasa.....	85
1. Wilayah Administrasi	85

2. Kondisi Fisik Wilayah.....	88
a. Kondisi Topografi	88
b. Kondisi Kemiringan Lereng	89
c. Jenis Tanah.....	90
d. Curah Hujan	92
e. Penggunaan Lahan.....	92
f. Kondisi Kependudukan	99
C. Analisis Tingkat Kesesuaian Lahan Pertanian.....	100
1. Analisis Satuan Kemampuan Lahan.....	100
a. Satuan Kemampuan Lahan Morfologi	100
b. Satuan Kemampuan Kemudahan Dikerjakan	101
c. Satuan Kemampuan Kestabilan Lereng.....	102
d. Satuan Kemampuan Kestabilan Pondasi	106
e. Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air	106
f. Satuan Kemampuan Lahan Drainase	107
g. Satuan Kemampuan Terhadap Erosi	108
h. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Bencana	113
2. Analisis Kemampuan Lahan	113
3. Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian	117
D. Analisis Penentuan Arah Pengendalian Ruang Dari Kesesuaian	122
Lahan Pertanian	
BAB V KESIMPULAN	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Tabel Variabel dan Kebutuhan Data	51
Tabel 3.2 Pembobotan SKL Morfologi	57
Tabel 3.3 Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan	57
Tabel 3.4 Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan	59
Tabel 3.5 Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi	60
Tabel 3.6 Pembobotan SKL Ketersediaan Air	61
Tabel 3.7 Pembobotan SKL Untuk Drainase	62
Tabel 3.8 Pembobotan SKL Terhadap Erosi	63
Tabel 3.9 Pembobotan SKL Terhadap Bencana Alam	64
Tabel 3.10 Klasifikasi Pengembangan Lahan.....	65
Tabel 3.11 Arahan Tata Ruang Pertanian	65
Tabel 3.12 Matriks Perbandingan.....	66
Tabel 4.2 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamasa.....	74
Tabel 4.3 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Mamasa	76
Tabel 4.4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di.....	78
Tabel 4.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Mamasa	80
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa Dirinci.....	82
Tabel 4.7 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamasa Menurut Kecamatan Tahun 2019.....	84
Tabel 4.8 Luas Wilayah di Kawasan Perkotaan Mamasa	86
Tabel 4.9 Kondisi Topografi di Wilayah Perencanaan	88
Tabel 4.10 Kondisi Kemiringan Lereng di Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Mamasa.....	89
Tabel 4.11 Luas Lahan dan Penggunaannya di Kawasan Perkotaan Mamasa Menurut Desa/Kelurahan (Hektar)	93
Tabel 4.12 Jumlah Pendudukan di Kawasan Perkotaan Mamasa Menurut Desa/Kelurahan	99
Tabel 4.13 SKL Morfologi Kawasan Perkotaan Mamasa	100
Tabel 4.14 SKL Kemudahan Dikerjakan Kawasan Perkotaan Mamasa	101

Tabel 4.15 SKL Kestabilan Lereng Kawasan Perkotaan Mamasa	102
Tabel 4.16 SKL Kestabilan Pondasi Kawasan Perkotaan Mamasa	106
Tabel 4.17 SKL Ketersediaan Air Kawasan Perkotaan Mamasa	107
Tabel 4.18 SKL Untuk Drainase Kawasan Perkotaan Mamasa	107
Tabel 4.19 SKL Terhadap Erosi Kawasan Perkotaan Mamasa	108
Tabel 4.20 SKL Terhadap Bencana Kawasan Perkotaan Mamasa	113
Tabel 4.21 Analisis Kemampuan Lahan Kawasan Perkotaan Mamasa	114
Tabel 4.22 Arahan Tata Ruang Pertanian Kawasan Perkotaan Mamasa	117
Tabel 4.23 Tabel Kesesuaian Lahan Kawasan Perkotaan Mamasa	119
Tabel 4.24 Matriks Perbandingan Kawasan Perkotaan Mamasa.....	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	47
Gambar 4.1 Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Mamasa	72
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Mamasa	73
Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamasa	75
Gambar 4.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Mamasa	77
Gambar 4.5 Peta Cura Hujan Kabupaten Mamasa	79
Gambar 4.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mamasa	81
Gambar 4.7 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Mamasa.....	87
Gambar 4.8 Peta Topografi Kawasan Perkotaan Mamasa.....	94
Gambar 4.9 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Mamasa	95
Gambar 4.10 Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Mamasa.....	96
Gambar 4.11 Peta Curah Hujan Kawasan Perkotaan Mamasa	97
Gambar 4.12 Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Mamasa	98
Gambar 4.13 Peta SKL Morfologi Kawasan Perkotaan Mamasa.....	103
Gambar 4.14 Peta SKL Kemudahan Dikerjakan K. Perkotaan Mamasa.....	104
Gambar 4.15 Peta SKL Kestabilan Lereng Kawasan Perkotaan Mamasa.....	105
Gambar 4.16 Peta SKL Kestabilan Pondasi Kawasan Perkotaan Mamasa	109
Gambar 4.17 Peta SKL Ketersediaan Air Kawasan Perkotaan Mamasa	110
Gambar 4.18 Peta SKL Untuk Drainase Kawasan Perkotaan Mamasa	111
Gambar 4.19 Peta SKL Terhadap Erosi Kawasan Perkotaan Mamasa	112
Gambar 4.20 Peta SKL Terhadap Bencana Kawasan Perkotaan Mamasa	115
Gambar 4.21 Peta Analisis Kemampuan Lahan K. Perkotaan Mamasa	116
Gambar 4.22 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Perkotaan Mamasa	118
Gambar 4.23 Peta Sebaran LP2B Kawasan Perkotaan Mamasa	120
Gambar 4.24 Peta Kesesuaian Lahan LP2B Kawasan Perkotaan Mamasa	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia. Indonesia sebagai negara Agraris menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor paling vital. Sebagian warga negaranya bermata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya salah satunya adalah lahan pertanian. Sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Pembangunan ketahanan pangan nasional merupakan salah satu aspek prioritas pemerintah melalui sektor pertanian. Sektor pertanian dalam konteks pembangunan nasional berkaitan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada berbasis komoditas pertanian (Undra, 2019).

Namun, seiring berjalannya waktu semakin besar populasi penduduk memaksa banyak perubahan yang terjadi, terutama dalam pembangunan. Hal tersebut dilakukan bukan semata tanpa alasan, tetapi menjadi suatu keharusan dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Pembangunan infrastruktur seperti perumahan dan industri berimbas pada alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap luas alih fungsi lahan, apabila jumlah penduduk meningkat, maka akan terjadi peningkatan juga

padaluas alih fungsi lahan pertanian. Dampak luas alih fungsi lahan pertanian terhadap produksi pangan utama berpengaruh signifikan terhadap produksi hasil panen (Hidayat & Rofiqoh, 2020).

Menurut Ismaya dalam (Masrukhin, 2019) menyebutkan bahwa faktor yang menjadi pendorong adanya perubahan atau alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian adalah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, Urbanisasi tenaga kerja pertumbuhan di sektor industri, rencana tata ruang yang mengakomodasi strategi pengembangan metropolitan serta belum adanya rencana tata ruang yang berkekuatan hukum baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan.

Penerapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berdasarkan perkembangan sektor-sektor ekonomi non-pertanian secara keruangan, dengan penyesuaian penggunaan lahan pada saat ini. Hal tersebut merupakan langkah positif dalam menghindari pelanggaran penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Marinda, 2020)

Upaya meminimalisir adanya pengalihfungsian lahan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam undang - undang tersebut berisi aturan mengenai melindungi lahan pertanian dari derasnya arus

degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan sebagai akibat dari meningkatnya penambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri.

Kabupaten Mamasa termasuk salah satu sentra produksi tanaman pangan di Sulawesi Barat selain daripada Kabupaten Polewali Mandar dengan luas panen dan produksi padi masing-masing 13.184,65 ha dan 55.805,36 ton dengan produktivitas 42,71 ku/ha. (BPS Sulawesi Barat, 2022). Kabupaten Mamasa memiliki luas wilayah 1.619,12 km² terdiri dari 17 kecamatan, 13 kelurahan, dan 168 desa, merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki potensi pengembangan lahan pertanian yang juga strategis.

Namun, seiring berkembangnya suatu wilayah maka fungsi ruang yang seharusnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan mengalami alihfungsi lahan menjadi Kawasan yang tidak sesuai peruntukannya seperti Kawasan pemukiman, perkantoran dan lain-lain. Oleh karena itu maka perlunya kajian terkait **“Arahan Pengendalian Ruang Kawasan Perkotaan Mamasa Ditinjau Dari Kesesuaian Lahan Pertanian”**, Guna mengkaji kondisi eksisting di lapangan dengan upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di wilayah studi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di paparkan rumusan masalah

yaitu :

1. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan pertanian di kawasan perkotaan mamasa?
2. Bagaimana arahan pengendalian ruang di kawasan perkotaan mamasa ditinjau dari kesesuaian lahan pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan pertanian di kawasan perkotaan mamasa
2. Memberikan rumusan arahan pengendalian ruang di kawasan perkotaan mamasa, ditinjau dari kesesuaian lahan pertanian

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan diatas maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya tentang arahan kesesuaian lahan pertanian.

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan wilayah khususnya pengendalian kawasan pertanian dan pemerintah dapat mengacu pada hasil rekomendasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Kawasan Perkotaan Mamasa.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui potensi lahan pertanian serta memahami arahan tata ruang. Sehingga pemahaman tentang fungsi lahan pertanian bagi masyarakat, dapat mencegah ketidaksesuaian rencana dan arahan tata ruang.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada Kawasan Perkotaan Mamasa, dalam penentuan batasan lokasi penelitian ini juga ditentukan dengan berdasarkan beberapa kriteria yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan lokasi. Sebagaimana pada Kawasan Perkotaan Mamasa diarahkan sebagian wilayahnya sebagai Kawasan lahan pangan berkelanjutan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan ini, maka dibuatkanlah sistematika penulisan yang secara garis besar menguraikan bab dan sub bab dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan judul yang diambil penulis yang di dalamnya akan membahas mengenai “Arahan Pengendalian Ruang Kawasan Perkotaan Mamasa Ditinjau Dari Kesesuaian Lahan Pertanian”

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini memuat tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, Teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum Kabupaten Mamasa, gambaran umum Kawasan Perkotaan Mamasa, serta tinjauan lokasi studi dan hasil arahan pengendalian ruang Kawasan Perkotaan Mamasa ditinjau dari kesesuaian lahan pertanian.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kawasan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, Penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup.

Menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

Menurut Van Aarsten pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.

Menurut analisis Klasik dari Kuznets pertanian di negara-negara sedang berkembang merupakan suatu sektor ekonomi yang sangat potensial, terdapat 4 bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi non pertanian sangat tergantung pada produk-produk dari sektor pertanian, bukan saja untuk kelangsungan pertumbuhan suplai makanan tetapi juga untuk penyediaan bahan baku untuk keperluan kegiatan produksi di sektor-sektor non pertanian tersebut.
2. Karena kuatnya bias agraris dari ekonomi selama tahap-tahap awal pembangunan, maka populasi di sektor pertanian daerah pedesaan membentuk suatu bagian yang sangat besar dari pasar permintaan domestik terhadap produk-produk dari industri dan sektor-sektor lain di dalam negeri, baik untuk barang-barang produsen maupun barang-barang konsumen, kuznets menyebutnya kontribusi pasar.
3. Karena relatif pentingnya pertanian bisa dilihat dari sumbangan out-put nya terhadap pembentukan produk domestik bruto dan andilnya terhadap penyerapan tenaga kerja tanpa bisa dihindari menurun dengan pertumbuhan atau semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi.
4. Sektor pertanian mampu berperan sebagai salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca

pembayaran, baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau peningkatan produksi komoditi-komoditi pertanian menggantikan impor.

B. Lahan

Lahan memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO maupun pendapat para ahli. Menurut Purwowidodo (1983) menjelaskan bahwa lahan atau lingkungan fisik yang didalamnya mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batasan tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan.

Lahan juga diartikan sebagai permukaan daratan dengan unsur pendukung berupa benda - benda padat, cair bahkan gas (Rafi,1985). Definisi lain yang juga menjelaskan Lahan yaitu sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO dalam Arsyad, 1989).

Suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat

tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

(FAO dalam Sitorus, 2004)

Menurut FAO dalam Rayes (2007), lahan memiliki banyak fungsi yaitu :

- Fungsi produksi

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui produksi biomassa yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, bahan bakar kayu dan bahan-bahan biotik lainnya bagi manusia, baik secara langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya kolam dan tambak ikan.

- Fungsi lingkungan biotik

Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (*terrestrial*) yang menyediakan habitat biologi dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan dan jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan tanah.

- Fungsi pengatur iklim

Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (*source*) dan rosot (*sink*) gas rumah kaca dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan dan transformasi dari energi radiasi matahari dan daur hidrologi global.

- Fungsi hidrologi

Lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah dan air permukaan serta mempengaruhi kualitasnya.

- Fungsi penyimpanan

Lahan merupakan gudang (sumber) berbagai bahan mentah dan mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia.

- Fungsi pengendali sampah dan polusi

Lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga dan pengubah senyawa-senyawa berbahaya.

- Fungsi ruang kehidupan

Lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri, dan aktivitas social seperti olahraga dan rekreasi.

- Fungsi peninggalan dan penyimpanan

Lahan merupakan media untuk menyimpan dan melindungi bendabenda bersejarah dan sebagai suatu sumber informasi tentang kondisi iklim dan penggunaan lahan masa lalu.

- Fungsi penghubung spasial

Lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antra daerah terpencil dari suatu ekosistem alami.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya termasuk didalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.

Sifat-sifat lahan sebagai mana yang diungkapkan oleh Arsyad (1989), menjelaskan bahwa lahan ialah atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, drainase tanah, jenis vegetasi dan sebagainya. Sifat lahan merupakan suatu penciri dari segala sesuatu yang terdapat di lahan tersebut yang merupakan pembeda dari suatu lahan yang lainnya.

Sifat lahan menunjukkan bagaimana kemungkinan penampilan lahan jika digunakan untuk suatu penggunaan lahan. Sifat lahan menentukan atau mempengaruhi keadaan yaitu bagaimana ketersediaan air, peredaran udara, perkembangan akan kepekaan erosi, ketersediaan unsur hara, dan sebagainya. Perilaku lahan yang menentukan pertumbuhan tersebut disebut kualitas lahan.

Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, perbaikan lahan (Jamulya, 1991).

- Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survey sumberdaya lahan pada umumnya disertai deskripsi karakteristik lahan.

- Kualitas Lahan

Kualitas lahan mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakteristik lahan yang berpengaruh. Suatu karakteristik lahan yang dapat berpengaruh pada suatu kualitas lahan tertentu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada kualitas lahan lainnya.

- Pembatas Lahan

Pembatas lahan merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh produksi yang optimal dan pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1) Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak dapat diperbaiki dengan usaha-usaha perbaikan lahan (land

improvement). (2) pembatas lahan sementara, pembatas lahan yang dapat diperbaiki dengan cara pengelolaan lahan.

- **Persyaratan Penggunaan Lahan**

Persyaratan penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: (1) Persyaratan ekologis, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur hara, ketersediaan oksigen, resiko banjir, lingkup temperatur, kelembapan udara, dan periode kering. (2) Persyaratan pengelolaan, contohnya persiapan pembibitan dan mekanisasi selama panen. (3) Persyaratan konservasi, contohnya control erosi, resiko komplek tanah, resiko pembentukan kulit tanah. (4) Persyaratan perbaikan, contohnya pengeringan lahan, tanggap terhadap pemupukan.

- **Perbaikan Lahan**

Perbaikan lahan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak dilakukan agar kualitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

C. Lahan Pertanian Berkelanjutan

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan maka kriteria lahan yang ditetapkan sebagai LP2B adalah sebagai berikut :

- Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
- Didukung infrastruktur dasar;
- Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut UU PLPPB. Dengan memperhatikan substansi yang diamanatkan dan efisiensi, maka peraturan pemerintah yang akan disusun disederhanakan menjadi 4 Peraturan Pemerintah yaitu: Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi

lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan pemerintah tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan pemerintah tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan pemerintah tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu peraturan pemerintah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi LP2B. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta kriteria dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (Bappenas, 2015).

Prinsip utama dari keberlanjutan adalah sebagai berikut:

- Mengintegrasikan proses biologis dan ekologis seperti siklus nutrisi, fiksasi nitrogen, regenerasi tanah, alelopati, kompetisi, pemangsaan dan parasitisme ke dalam proses produksi makanan,
- Meminimalkan penggunaan input yang tidak terbarukan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau kesehatan petani dan konsumen
- Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan petani secara produktif, sehingga meningkatkan kemandirian mereka dan

mengganti sumber daya manusia untuk input eksternal yang mahal

- Memanfaatkan secara produktif kapasitas kolektif masyarakat untuk bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah pertanian dan sumber daya alam yang umum, seperti untuk hama, daerah aliran sungai, irigasi, hutan dan manajemen kredit.

D. Alih Fungsi Lahan

Menurut Lestari (2009), mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian.

Menurut Malthus (1798) dalam bukunya yang berjudul *principles of population* menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat di bandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin

berkurang keberadaanya karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya.

Karena perkembangan yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia. Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara keberadaan lahan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya akan terjadi bahaya pangan bagi manusia.

Salah satu saran Malthus agar manusia terhindar dari malapetaka karena adanya kekurangan bahan makanan adalah dengan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Pengawasan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan berbagai kebijakan misalnya saja dengan program keluarga berencana. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, sehingga bahaya kerawanan pangan dapat teratasi. Kebijakan lain yang dapat diterapkan adalah dengan menunda usia kawin sehingga dapat mengurangi jumlah anak.

Malthus berpendapat bahwa pada umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur yang akan berlipat ganda tiap 30-40 tahun. Pada saat

yang sama karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang (deminishing return) dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Hal ini karena setiap anggota masyarakat akan memiliki lahan pertanian yang semakin sempit, maka kontribusi marjinalnya atas produksi pangan akan semakin menurun.

Menurut Kustiawan (1997) alih fungsi atau konversi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Alih fungsi lahan umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan. Adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dimana penawaran terbatas sedangkan permintaan tak terbatas menyebabkan alih fungsi lahan.

Menurut Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai-nilai yang disebabkan oleh perkembangan

usia. Sumaryanto dan Tahlim (2005) mengungkapkan bahwa pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek:

- Pertama, alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya motif tindakan ada tiga, yaitu: (1) untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, (2) dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, (3) kombinasi dari (1) dan (2) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha. Pola alih fungsi lahan ini terjadi di sembarang tempat, kecil-kecil, dan tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya baru signifikan untuk jangka waktu lama.
- Alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi. Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya berlangsung cepat dan nyata.

Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara (Utomo, 1992). Jika lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka alih fungsi lahan bersifat permanen. Akan tetapi, jika sawah tersebut berubah menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi

lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Alih fungsi lahan permanen biasanya lebih besar dampaknya dari pada alih fungsi lahan sementara.

E. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sumaryanto dan Tahlim (2005) mengungkapkan bahwa dampak negatif dari konversi lahan sawah adalah degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional, pendapatan pertanian menurun, dan meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal. Selain itu dampak lainnya adalah rusaknya ekosistem sawah, serta adanya perubahan budaya dari agraris ke budaya urban sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas.

Menurut Firman (2005) dalam Widjanarko (2006) bahwa alih fungsi lahan yang terjadi menimbulkan dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian juga berpengaruh terhadap lingkungan. Perubahan lahan pertanian

menjadi lahan non-pertanian akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem lahan pertanian.

Menurut Ruswandi (2007) secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau sehingga lingkungan air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian semakin sempit.

Menurut Pakpahan dkk. (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi atau konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat wilayah yaitu faktor yang tidak langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan konversi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani yaitu faktor yang langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan alih fungsi.

Di tingkat wilayah, alih fungsi lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman, dan sebaran lahan sawah. Pengaruh langsung dipengaruhi oleh

pengaruh tidak langsung, seperti pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta peningkatan arus urbanisasi akan meningkatkan tekanan penduduk atas lahan dipinggiran kota.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani adalah kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan serta pajak tanah, harga tanah dan lokasi tanah.

Menurut Martin Situmeang (1998), perubahan struktur ekonomi dimana telah terjadi peningkatan peranan sektor non-pertanian terhadap perekonomian dapat mempercepat perubahan pola penggunaan lahan ke arah pengkotaan.

Menurut Winoto (2005) faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain:

1. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.

2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor nonpertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk bertani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya.
3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
4. Perilaku myopic, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Hal ini antara lain tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian untuk penggunaan tanah nonpertanian.
5. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (Law Enforcement) dari peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kustiawan (1997) dalam hasil kajiannya menyatakan bahwa ada faktor yang berpengaruh terhadap proses alih fungsi lahan pertanian sawah, yaitu:

- a. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian
- b. Faktor-faktor Internal adalah kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan yang mendorong lepasnya kepemilikan lahan, dan.
- c. Faktor Kebijakan Pemerintah

F. Kemampuan Lahan

Menurut Klingebiel dan Montgomery dalam (Satriawan & Fuady, 2014) menyebutkan bahwa kemampuan lahan pada dasarnya merupakan potensi lahan untuk berbagai penggunaan dalam sistem pertanian secara luas dan tidak menitik-beratkan pada peruntukkan jenis tanaman tertentu. Lahan dengan kelas kemampuan yang tinggi mempunyai potensi lebih besar untuk berbagai bentuk penggunaan dalam kegiatan pertanian secara intensif.

Kemampuan lahan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Sedangkan

daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Kemampuan lahan adalah kapasitas suatu lahan untuk memproduksi. Kemampuan ini sering diartikan sebagai potensi lahan untuk penggunaan pertanian secara umum dengan kemampuan produksi dari tanah tersebut yang didasarkan pada faktafakta iklim, drainase dan kemiringan.

Klasifikasi kemampuan lahan merupakan penilaian lahan secara sistematis dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari (Arsyad,2006).

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M.2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang menjelaskan bahwa analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan untuk dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan. Output (keluaran) dari analisis ini adalah berupa peta kelas kemampuan lahan (zonasi) yang terdiri dari kawasan pengembangan, kawasan penyangga dan kawasan lindung sebagai gambaran dari tingkatan kemampuan lahan pada daerah perencanaan. Analisis kemampuan lahan ini bermaksud untuk mengkaji tingkatan kemampuan lahan untuk

mengkaji tingkatan kemampuan lahan pada daerah studi berdasarkan aspek fisik dasar. Aspek fisik dasar merupakan salah satu materi yang diperlukan dalam rencana pengembangan suatu kota.

SKL berdasarkan Sembilan analisis yang mengacu pada (Permen PU No 20 Tahun 2007), yaitu SKL Morfologi, SKL Kemudahan dikerjakan, SKL Kestabilan Lereng, SKL Kestabilan Pondasi, SKL Ketersediaan Air, SKI Untuk Drainase, SKL Terhadap Erosi, SKL Pembuangan Limbah, SKL Terhadap Bencana Alam, Kemudian Kesembilann SKL ini akan di overlay sehingga menghasilkan kemampuan lahan/ sesuai dengan klafisikasi kemampuan lahan.

1. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya.

2. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan atau pengembangan kawasan.

3. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Tujuan analisis SKL Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan data dari peta topografi, peta kelerengan, dan peta morfologi. Kestabilan lereng artinya wilayah tersebut dapat dikatakan stabil atau tidak kondisinya dengan melihat kemiringan lereng di lahan tersebut. Bila suatu kawasan disebut kestabilan lerengnya rendah, maka kondisi wilayahnya tidak stabil. Tidak stabil artinya mudah longsor, mudah bergerak yang artinya tidak aman dikembangkan untuk bangunan atau permukiman dan budi daya. Kawasan ini bisa digunakan untuk hutan, perkebunan dan resapan air.

4. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Tujuan dari analisis SKL Kestabilan Pondasi mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jeni-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

5. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Keteresediaan Air

Tujuan analisis SKL Keteresediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada

masingmasing tingkatan, guna pengembangan kawasan. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

6. Satuan Kemampuan lahan (SKL) Untuk Drainase

Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Drainase tinggi artinya aliran air mudah mengalir atau mengalir lancar. Drainase rendah berarti aliran air sulit dan mudah tergenang.

7. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi sertaantisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

8. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dari korban akibat bencana tersebut. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

9. Kemampuan Pengembangan Lahan

Analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai gambaran dalam pengembangan kota berkelanjutan. Analisis kemampuan lahan juga digunakan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Data-data yang dibutuhkan meliputi peta-peta hasil analisis SKL. Keluaran dari analisis ini meliputi :

- a. Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan.
- b. Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan

G. Kesesuaian Lahan

Evaluasi kesesuaian lahan dapat didefinisikan sebagai proses penilaian dari penggunaan lahan pada saat tertentu. Evaluasi kesesuaian lahan merupakan sebuah cara untuk memprediksikan penggunaan lahan sesuai dengan persyaratan suatu tanaman tertentu, sehingga diharapkan mampu menghasilkan keuntungan (Hapsari, dkk., 2014).

Kesesuaian lahan sangat penting untuk menentukan keberhasilan produksi suatu tanaman (Supriyadi, dkk., 2017) Sebagai contoh lahan sangat sesuai untuk irigasi, lahan cukup

sesuai untuk pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim.

Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (*present*) atau setelah diadakan perbaikan (*improvement*). Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungannya, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi dan/atau drainase sesuai untuk suatu usaha tani atau komoditas tertentu yang produktif (Djaenudin, dkk, 2011).

Kecocokan tersebut dinilai berdasarkan analisis kualitas lahan sehubungan dengan persyaratan suatu jenis lahan tertentu, sehingga kualitas yang baik akan memberikan nilai lahan atau kelas yang tinggi terhadap jenis penggunaan tertentu. Penilaian yang dilakukan dapat saja mengacu pada kondisi sekarang atau didasarkan pada kondisi setelah dilakukan perbaikan terhadap kualitas lahan. Yang pertama disebut sebagai kesesuaian sekarang atau kesesuaian aktual, sementara yang kedua adalah kesesuaian lahan potensial. Dengan demikian, tingkat atau kesesuaian lahan terhadap penggunaan lahan tertentu tidak permanen; kelas kesesuaian dapat berubah setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap faktor pembatas utama. Selanjutnya, dalam evaluasi kesesuaian lahan sering dijumpai kondisi dimana kualitas lahan tidak relevan.

Evaluasi kesesuaian lahan untuk suatu komoditas pertanian dapat disusun berdasarkan kondisi lahan. Hal tersebut dikarenakan setiap jenis tanaman mempunyai syarat tumbuh tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan karakteristik lahan suatu wilayah. (Fauzi, dkk 2018).

Oleh karena itu untuk meningkatkan sektor pertanian di perlukan kebijakan pemerintah dan anjuran teknis dalam sektor pertanian (Muhammad dan Wasit 2015).

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial) (Ritung, dkk, 2007).

Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi (Suryani dan Setriani, 2017).

Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar

atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai. Evaluasi kesesuaian lahan dapat didefinisikan sebagai proses penilaian dari penggunaan lahan pada saat tertentu (Hapsari, dkk., 2014).

Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna lahan (Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007). Evaluasi kesesuaian lahan merupakan sebuah cara untuk memprediksikan penggunaan lahan sesuai dengan persyaratan suatu tanaman tertentu, sehingga diharapkan mampu menghasilkan keuntungan. Persyaratan penggunaan lahan adalah sekelompok kualitas lahan yang diperlukan oleh suatu tipe penggunaan lahan agar dapat berproduksi dengan baik. Kualitas lahan yang dimaksud adalah suatu batasan nilai ideal untuk tiap-tiap parameter tertentu. Kelas kesesuaian lahan merupakan pembagian lebih lanjut dari ordo dan menggambarkan tingkat kesesuaian dari suatu ordo. Tingkat dalam kelas ditunjukkan oleh angka (nomor urut) yang ditulis di belakang simbol ordo.

Pembagian dan definisi kualitatif masing-masing kelas jika menggunakan 3 kelas untuk ordo sesuai dan 2 kelas untuk ordo tidak sesuai, adalah sebagai berikut (Samuel, Sitorus, & Supriadi, 2013: 2).

Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi.

Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai (Ritung dkk., (2007) dalam Hamka dkk., 2015: 17).

Struktur klasifikasi kesesuaian lahan yang digunakan pada dasarnya mengacu pada Framework of Land Evaluation (FAO) tahun 1976 dalam dengan menggunakan 4 kategori, yaitu ordo, kelas, subkelas dan unit. Dalam pemetaan tanah tingkat semi detil, klasifikasi kesesuaian lahan dilakukan sampai tingkat subkelas (Ritung dkk., 2011: 10).

1. Ordo : Menggambarkan kesesuaian lahan secara umum. Pada tingkat ordo kesesuaian lahan dibedakan atas lahan tergolong sesuai (S) dan lahan tergolong tidak sesuai (N)
2. Kelas : Menggambarkan tingkat kesesuaian lahan dalam ordo. Pada tingkat kelas, lahan yang tergolong ordo sesuai (S) dibedakan atas lahan sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), dan sesuai marginal (S3). Sedangkan lahan tergolong ordo tidak sesuai (N) tidak dibedakan.
 - a. Kelas sangat sesuai (S1) : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan berkelanjutan, atau hanya mempunyai faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak mereduksi produktivitas lahan secara nyata.
 - b. Kelas cukup sesuai (S2) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang mempengaruhi produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut umumnya masih dapat diatasi oleh petani.
 - c. Kelas sesuai marginal (S3) : Lahan mempunyai faktor pembatas berat yang mempengaruhi produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak dari lahan tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 diperlukan modal tinggi, sehingga perlu bantuan atau

intervensi pemerintah atau pihak swasta karena petani tidak mampu mengatasinya

d. Kelas tidak sesuai (N) : Lahan yang tidak sesuai (N) karena mempunyai faktor pembatas yang sangat berat dan/atau sulit diatasi.

3. Subkelas : Menggambarkan tingkat kesesuaian lahan dalam kelas. Kelas kesesuaian lahan dapat dibedakan atas subkelas kesesuaian lahan berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan yang menjadi faktor pembatas terberat. Sebaiknya jumlah faktor pembatas maksimum dua. Tergantung pengaruh faktor pembatas dalam subkelas, kelas kesesuaian lahan yang dihasilkan dapat diperbaiki sesuai dengan masukan yang diperlukan.

4. Unit : Menggambarkan tingkat kesesuaian lahan dalam subkelas yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh terhadap pengelolaannya. Semua unit yang berada dalam satu subkelas mempunyai tingkatan yang sama dalam kelas dan mempunyai jenis pembatas yang sama pada tingkatan subkelas. Unit yang satu berbeda dari unit yang lainnya dalam sifat-sifat atau aspek tambahan dari pengelolaan yang diperlukan dan merupakan pembedaan dari faktor pembatasnya. Dengan diketahuinya pembatas tingkat unit, maka akan memudahkan penafsiran secara detil dalam perencanaan usahatani. Contoh,

Kelas S3r1 dan S3r2, keduanya mempunyai kelas dan subkelas yang sama dengan faktor penghambat yang sama, yaitu kedalaman efektif, namun unit berbeda. Unit 1 mempunyai kedalaman efektif sedang (50 - 75 cm), dan Unit 2 mempunyai kedalaman efektif dangkal (< 50 cm). Dalam praktek evaluasi lahan, kesesuaian lahan pada kategori unit ini jarang digunakan.

H. Arahana Tata Ruang Wilayah Pertanian

Aturan dalam UU No. 24/1992 yang secara jelas berisi tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya dilaksanakan secara baik oleh berbagai pihak yakni mempertimbangkan budidaya tanaman pangan (sawah irigasi teknis) agar tetap lestari dengan demikian pembangunan ekonomi juga sudah seharusnya tetap mengikuti/mentaati Undang-undang RTRW untuk menjaga ketahanan pangan.

Undang-undang No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan

ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan dukungan kepada petani yang tidak mengalih fungsikan lahannya dengan memberikan insentif berupa peningkatan infrastruktur, bantuan keringanan pajak, serta penyediaan sarana produksi pertanian dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

PP No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan Konstitusioan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

PP No 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahn, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

PP No 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan

mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan, pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

I. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tentunya tidak terlepas dari penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan dan untuk menjadi sebuah acuan dalam penulisan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai kesesuaian lahan pertanian dan rekomendasi pengendalian alih fungsi kawasan pertanian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Terbit	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Rudi Sitompul, dkk (Tahun 2018).	Evaluasi Kesesuaian Lahan Pada Areal Penggunaan Lain Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat Untuk Pengembangan Tanaman Cabai Merah	Metode Kuantitatif	Faktor pembatas ketersediaan hara, curah hujan yang tinggi, dan bahaya erosi. Faktor pembatas utama dalam menilai kesesuaian lahannya, dilakukan pengelolaan dengan penambahan unsur hara ke dalam tanah, pembuatan drainase, serta pembuatan teras dan menanam sejajar kontur. Kondisi lahan aktual yang sesuai dibudidayakan di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu adalah: Cabai Merah (<i>Capsicum annuum</i> L.) seluas 1.266,95 ha.

2.	Nurwita Mustika Sari, dkk (Tahun 2019)	Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi	Metode Kuantitatif	Lahan sawah sebagai kelas penggunaan yang mendominasi di kawasan BIJB Kertajati mengalami penurunan luasan dari tahun ke tahun sebagai dampak pembangunan BIJB Kertajati. Penggunaan lahan sawah mengalami penurunan luasan sejak 2013 hingga 2018 di wilayah kajian, yaitu dari 5.822, 80 ha pada tahun 2013 menjadi 5.347,30 ha pada tahun 2018. Berdasarkan masterplan pembangunan BIJB Kertajati diketahui bahwa kota bandara atau aero city Kertajati akan dibangun pada bagian utara jalan tol Cipali tepatnya exit tol bandara. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan sawah, kebun campur dan semak/ belukar pada bagian utara wilayah tersebut berpotensi mengalami penurunan pada masa yang akan datang.
----	---	--	--------------------	--

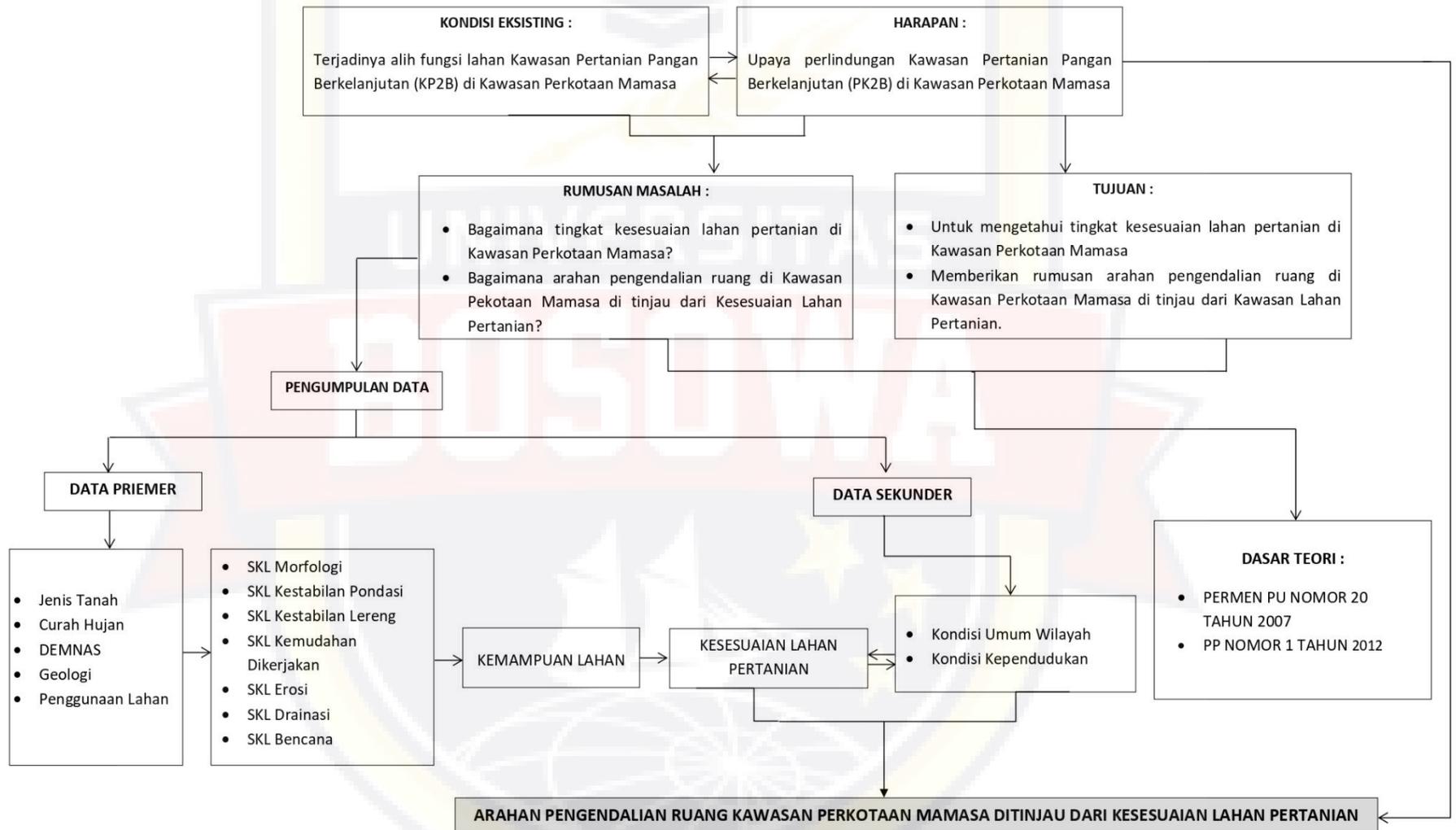
3.	Rossi Prabowo, dkk (Tahun 2020)	Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian	Metode Kuantitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dapat bersifat sementara maupun permanen, dapat berupa konversi gradual berpola sporadic, Konversi sistematis berpola “enclave”, Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk, Konversi yang disebabkan oleh masalah social, Konversi tanpa beban dan Konversi adaptasi agraris. • Konversi lahan di pengaruhi oleh faktor eksternal antara lain ekonomi, sosial budaya, peningkatan jumlah penduduk serta regulasi sedangkan faktor internal seperti lahan yang kurang produktif dan desakan ekonomi petani. • Konversi lahan pertanian mempunyai dampak positif berupa peningkatan
----	---------------------------------	--	---------------------	---

				<p>investasi di sektor non pertanian tetapi mempunyai dampak negatif terhadap terancamnya ketahanan pangan nasional dan turunnya kualitas lingkungan.</p>
4.	Rizqi Wardiana Sari, dkk (Tahun 2021)	Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan	Metode Kualitatif Deskriptif.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebab utama alih fungsi lahan yaitu terdapat pada kebijakan pemerintah disertai dengan seiring pertumbuhan perkotaan yang memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan serta rumah tangga pemilik lahan pertanian yang mendorong mereka melepaskan pemilikan atau penggunaan lahannya. • Dampak yang ditimbulkan pada alih fungsi lahan adalah perubahan kondisi sosial ekonomi yang dirasakan oleh petani menyebabkan petani kehilangan lahannya tersebut sebagian besar

				<p>berdampak pada turunnya penghasilan, nilai lahan yang menjadi tinggi terjadi di sepanjang jalan-jalan besar seperti jalan arteri, hal itu terjadi karena jalan-jalan besar/arteri merupakan jalan yang yang ramai dan fasilitas-fasilitas umum yang memadai berada dikawasan sekitar. Dampak adanya alih fungsi lahan ini juga berdampak positif bagi masyarakat terdapat lowongan kerja baru untuk bekerja disekitar perumahan serta para masyarakat mengambil alih membuka usaha seperti warung makan atau blok dan ruko disekitar kawasan.</p>
5.	Gaiby Oktavia Palleng, dkk (Tahun 2021)	Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan	Metode Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketahanan pangan, terutama di era liberalisasi pertanian harus dilihat dalam kerangka mewujudkan kedaulatan pangan

		<p>Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</p>	<p>sebagai upaya menunjukkan jati diri bangsa. Alih fungsi lahan seyogianya dikendalikan tidak hanya dengan pendekatan hukum/regulasi (sebagai first order condition) tapi juga disertai inisiatif dan penguatan kelembagaan sosial di tingkat petani (sebagai second order condition)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya mewujudkan pertanian berkelanjutan yang dapat tetap produktif untuk generasi yang akan datang, guna untuk memelihara dan meningkatkan kualitas ketahanan pangan Nasional
--	--	---	--

J. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian berada di Kawasan deleniasi yang mencakup 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sesenapadang, dan Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Dimana, didalam Kawasan deleniasi ini terdapat 9 desa yaitu Desa Bombong Lambe, Bubun Batu, Buntu Buda, Lambanan, Osango, Rambusaratu, Tondok Bakaru , Rantepuang, Rantetangnga, dan 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Mamasa dan Kelurahan Tawalian, dengan luas Kawasan deleniasi sebesar 2.491,49 Ha.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2010), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed

methods) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Munculnya metode mixed methods ini mulanya hanya mencari usaha penggabungan antara data kualitatif dengan data kuantitatif (Creswell, 2010) Diperjelas lagi oleh Tashakkori dan Teddi dalam bukunya yang berjudul Mixed Methodology, bahwa mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini muncul setelah adanya debat yang berkepanjangan antara dua paradigma yang menjadi pedoman dari peneliti, kedua paradigma tersebut adalah positivis/empiris yang menjadi dasar konseptual dari metode kuantitatif dan paradigma.

2. Sumber Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden atau lapangan disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari suatu lembaga atau institusi dalam bentuk sudah jadi disebut data sekunder. Data yang dipakai sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara survey langsung di lapangan. Adapun data primer yang diperlukan meliputi data penggunaan lahan

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada pada instansi terkait, studi pustaka dan data-data hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang diperoleh di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa dan Bappeda Kabupaten Mamasa yang diperlukan terkait dengan wilayah studi adalah:

- Kondisi Umum Wilayah Studi meliputi topografi, jenis tanah, iklim dan curah hujan
- Kondisi Kependudukan di wilayah studi.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2002), Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati. Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka yang menjadi fokus variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Tabel Variabel dan Kebutuhan Data

Rumusan	Variabel	Sumber Data	Tujuan
1. Bagaimana Tingkat Kesesuaian Lahan Pertanian Di Kawasan Perkotaan Mamasa?	Peta Penggunaan Lahan	Data RTRW	Bahan analisis SKL
	Peta Jenis Tanah	Data RTRW	Bahan analisis SKL
	Peta Curah Hujan	CHRS	Bahan analisis SKL
	DEMNAS	INA-Geoportal	Kemiringan lereng, topografi, dsb
	Peta Geologi	Data RTRW	Bahan Analisis SKL
	SKL Morfologi	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kestabilan Pondasi	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kestabilan Lereng	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Kemudahan dikerjakan	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Ketersediaan Air	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Erosi	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian
	SKL Drainase	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian

Rumusan	Variabel	Sumber Data	Tujuan
	SKL Bencana	Hasil Analisis SKL	Arahan Kesesuaian Pertanian
2. Bagaimana konsep pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa?	Arahan kesesuaian lahan pertanian	Hasil analisis	
	Peta Pola Ruang	Data RTRW	Integrasi terhadap konsep pengendalian alih fungsi kawasan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa
	KP2B	Data RTRW	Konsep pengendalian alih fungsi lahan Kawasan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa

Sumber: Hasil Kajian 2022

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, data spasial, data kebijakan data statistic, dan dengan motode dokumentasi .

1. Observasi Lapangan

Menurut Sugiyono (2014) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi lapangan pada penelitian ini berupa:

- Kondisi Eksisting kawasan pertanian di area Perkotaan
- Kondisi eksisting kawasan pertanian di area LP2B
- Kondisi eksisting Kawasan pertanian di area Pedesaan

2. Data Spasial

Menurut Hussein & Hasan. (2021) Data spasial adalah data yang bisa menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Data spasial memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat.

Data spasial sering juga disebut dengan data geospasial, data geografis, atau geodata. Seiring dengan berkembangnya produksi data, jumlah data spasial bertambah dengan pesat. Data spasial yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- Peta Tematik
- Peta Administrasi wilayah, dst.

3. Data Kebijakan

Data kebijakan merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan yang memuat rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Adapun data kebijakan yang digunakan pada penelitian ini adalah data RTRW dan KP2B.

4. Data Statistik

Data statistik adalah bagian tunggal dari informasi faktual yang direkam dan digunakan untuk tujuan analisis. Hal ini menggambarkan bahwa data menjadi informasi mentah dari mana statistik dibuat. Statistik adalah hasil analisis data, interpretasi, dan penyajiannya. Dengan kata lain, beberapa komputasi telah dilakukan yang memberikan pemahaman tentang arti data statistik seringkali, meskipun tidak harus, disajikan dalam bentuk tabel,

bagan, atau grafik. Definisi data statistik menurut para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Anhar, data statistik adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi.
- 2) Menurut Haer Talib, data statistik adalah sebagai sekumpulan fakta dan sebuah fakta tak lain adalah sebuah kenyataan atau kejadian.

Adapun pada penelitian ini data statistik yang di gunakan peneliti adalah data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa.

5. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dakumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

“Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis” (Burhan, 2008). Metode ini adalah usaha untuk mengumpulkan data atau informasi dengan menyalin data yang sudah diterbitkan oleh suatu institusi. Pada dokumentasi dokumentasi penelitian ini di peroleh dari berbagai publikasi, laporan buku literatur, jurnal dan makalah yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Dari uraian tersebut maka tahap pembahasan dan analisa data dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kawasan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa peneliti menggunakan teknik skoring dari satuan kemampuan lahan sesuai dengan Permen PU No.20 tahun 2007 tentang permen pu no 20. Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan bahwa Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terdiri dari beberapa SKL diantaranya :

- a. **Satuan kemampuan Lahan (SKL) Morfologi**

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis skl morfologi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pembobotan SKL Morfologi

No	Peta Kemiringan (%)	Peta Morfologi	SKL Morfologi	Nilai
1.	0-2	Dataran	Tinggi (9-10)	5
2.	2-5	Landai	Cukup (7-8)	4
3.	5-15	Perbukitan Sedang	Sedang (5-6)	3
4.	15-40	Pegunungan/ Perbukitan Terjal	Kurang (3-4)	2
5.	>40	Pegunungan/ Perbukitan Sangat Terjal	Rendah (1-2)	1

Sumber : Permen PU No 20 Tahun 2007

b. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan atau pengembangan kawasan.

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis skl kemudahan dikerjakan lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

No	Topografi (mdpl)	Morfologi	Lereng	Jenis tanah	Penggunaan Lahan	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
1.	0 – 250	Datar	>40%	Aldosol, podsolik, dst	Lahan Non Terbangun	Kemudahan Dikerjakan cukup	4

2.	250–500	Berombak	25 – 40%	Brown Forest Soil,dst		Kemudahan Dikerjakan Sedang	3
3.	500 – 1500	Bergelombang	15-25 %	Latosol		Kemudahan Dikerjakan Rendah	2
4.	1500 – 3000	Berbukit	2 - 15 %	Aluvial, dst	Lahan Terbangun	Kemudahan Dikerjakan Sangat Rendah	1
5.	> 3000	Bergunung	0 - 2 %				

Sumber : Permen PU No 20 Tahun 2007

c. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Tujuan analisis SKL Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan data dari peta topografi, peta kelerengan, dan peta morfologi.

Kestabilan lereng artinya wilayah tersebut dapat dikatakan stabil atau tidak kondisinya dengan melihat kemiringan lereng di lahan tersebut. Bila suatu kawasan disebut kestabilan lerengnya rendah, maka kondisi wilayahnya tidak stabil. Tidak stabil artinya mudah longsor, mudah bergerak yang artinya tidak aman dikembangkan untuk bangunan atau permukiman dan budi daya. Kawasan ini bisa digunakan untuk hutan, perkebunan dan resapan air.

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Kestabilan Lereng lebih jelasnya pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

No	Morfologi	Lereng	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
1.	Datar	0 – 2 %	0 - 250	Aluvial, dst	0 - 100	Lahan Non Terbangun	Kestabilan Lereng Tinggi	5
2.	Berombak	2 – 15 %	250 - 500	Latosol			Kestabilan Lereng Cukup	4
3.	Bergelombang	15 – 25 %	500 -1500	Brown Forest Soil, dst	100 – 300	Lahan Terbangun	Kestabilan Lereng Cukup	3
4.	Berbukit	25 – 40 %	1500-3000	Andosol, Podsolik, dst	300 – 500		Kestabilan Lereng Rendah	2
5.	Bergunung	>40 %	>3000	Regosol, Litosol, dst	0 - 100			

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

d. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Tujuan dari analisis SKL Kestabilan Pondasi mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jeni-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan (Permen Pu No 20 Tahun, 2007).

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Kestabilan Pondasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi

No	Jenis Tanah	Penggunaan Lahan	SKL Kestabilan Lereng	SKL Kestabilan Pondasi	Nilai
1.	Andosol, Podsolik, dst.	Lahan Non Terbangun	Kestabilan Lereng Rendah	Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Rendah	1
2.	Brown Forest Soil, dst		Kestabilan Lereng Sedan		
3.	Latosol	Lahan Terbangun	Kestabilan Lereng Cukup	Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Kurang	2
4.	Aluvial, dst		Kestabilan Lereng Tinggi		

Sumber : Permen Pu No 20 Tahun 2007

e. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Tujuan analisis SKL Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Ketersediaan Air lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Pembobotan SKL Ketersediaan Air

No.	Morfologi	Lereng	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Ketersediaan Air	Nilai
1	Bergunung	>40%	Andosol, Podsolik, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Ketersediaan Air rendah	1
2	Berbukit	25-40%	Brown Forest Soil, dst	300 - 500		Ketersediaan Air Kurang	2
3	Bergelombang	15-25%	Latosol	100 - 300	Lahan Terbangun	Ketersediaan Air Sedang	3
4	Berombak	2-15%	Aluvial, dst	0 - 100		Ketersediaan Air Tinggi	5
5	Datar	0-2 %					

Sumber : Permen Pu No 20 Tahun 2007

f. Satuan Kemampuan lahan (SKL) Untuk Drainase

Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Drainase tinggi artinya aliran air mudah mengalir atau mengalir lancar. Drainase rendah berarti aliran air sulit dan mudah tergenang.

Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Untuk Drainase lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Pembobotan SKL Untuk Drainase

No	Morfologi	Lereng	Ketinggian	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Ketersediaan Air	Nilai
1	Bergunung	>40%	>3000	Andosol, Podsolik, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Ketersediaan Air rendah	1
2	Berbukit	25-40%	1500 - 3000	Brown Forest Soil, dst	300 - 500		Ketersediaan Air Kurang	2
3	Bergelombang	15-25%	500-1500	Latosol	100 – 300	Lahan Terbangun	Ketersediaan Air Sedang	3
4	Berombak	2-15%	250 - 500	Aluvial, dst	0 - 100		Ketersediaan Air Tinggi	5
5	Datar	0-2 %	0 -250					

Sumber : Permen Pu No 20 Tahun 2007

g. Satuan kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi sertaantisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Terhadap Erosi lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Pembobotan SKL Terhadap Erosi

No	Morfologi	Lereng	Jenis Tanah	Curah Hujan	Pengguna Lahan	SKL Terhadap Erosi	Nilai
1.	Bergunung	>40%	Regosol, Litosol, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Erosi Tinggi	1
2.	Berbukit	25 – 40%	Andosol, Podsolik, dst	300-500		Erosi Cukup tinggi	2
						Erosi Sedang	3
3.	Bergelombang	15-25%	Brown Forest Soil. Dst	100 - 300	Lahan Terbangun	Erosi Sangat Rendah	4
4.	Berombak	2-15%	Aluvial , dst	0 - 100		Tidak Ada Erosi	5
5.	Datar	0-2%					

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

h. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dari korban akibat bencana tersebut. (Permen Pu No 20 Tahun, 2007). Adapun parameter data dan pemberian nilai dalam menganalisis SKL Terhadap Bencana Alam lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9 Pembobotan SKL Terhadap Bencana Alam

N O	Morfologi	Lere ng	Ketin ggian	Jenis Tanah	Curah Hujan	Penggunaan Lahan	SKL Bencana Alam	Nilai
1	Bergunung	>40 %	>3000	Andosol Podsolik, dst	>500	Lahan Non Terbangun	Potensi Bencana Alam Tinggi	5
2	Berbukit	25 - 40%	1500 - 3000	Brown Forest Soil, dst	300-500			
3	Bergelombang	15-25 %	500-1500	Latosol	100-300	Lahan Terbangun	Potensi Bencana Alam Cukup	4
4	Berombak	2-15%	250 - 500	Aluvial, dst	0 -100		Potensi Bencana Alam Kurang	
5	Datar	0-2%	0-250					

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

i. Kemampuan Pengembangan Lahan

Analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai gambaran dalam pengembangan kota berkelanjutan. Analisis kemampuan lahan juga digunakan sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Data-data yang dibutuhkan meliputi peta-peta hasil analisis SKL. Keluaran dari analisis ini meliputi

- a. Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan.

- b. Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi Kawasan

Adapun klasifikasi dalam pengembangan lahan lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Klasifikasi Pengembangan Lahan

Klasifikasi	Keterangan
Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah
Kelas B	Kemampuan Pengembangan rendah
Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang
Kelas D	Kemampuan Pengembangan Tinggi
Kelas E	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

j. Arahan Tata Ruang Pertanian

Arahan tata ruang pertanian bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahannya.

Adapun klasifikasi dalam arahan rasio tutupan lahan lebih jelasnya bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.11 Arahan Tata Ruang Pertanian

Klasifikasi	Kemampuan Lahan	Arahan Tata Ruang Pertanian	
	Kemampuan Pengembangan	Klasifikasi	Nilai
Kelas A	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	Lindung	1
Kelas B	Kemampuan Pengembangan rendah	Kawasan Penyangga	2

Klasifikasi	Kemampuan Lahan Kemampuan Pengembangan	Arahan Tata Ruang Pertanian	
		Klasifikasi	Nilai
Kelas C	Kemampuan Pengembangan Sedang	Tanaman Tahunan	3
Kelas D	Kemampuan Pengembangan Tinggi	Tanaman Setahun	4
Kelas E	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	Tanaman Setahun	5

Sumber: Permen Pu No 20 Tahun 2007

3. Untuk rekomendasi pengendalian Kawasan pertanian menggunakan studi literatur dan analisis *overlay* serta maktris perbandingan rancangan tata ruang Kawasan pertanian Kabupaten Mamasa. Berikut contoh maktris perbandingan:

Tabel 3.12 Matriks Perbandingan

No.	Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang RTRW	LP2B	Luas	Konsep Rekomendasi
1.

F. Definisi operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pengertian yang operasional dalam penelitian. Definisi ini digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrument penelitian, berikut definisi operasional dari penelitian ini;

1. RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.

1. Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial).

2. Satuan Kemampuan Lahan

Satuan kemampuan lahan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan agar dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan dan mengkaji tingkatan kemampuan lahan pertanian pada daerah Kecamatan Bantimurung berdasarkan aspek fisik dasar.

3. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengawasan, perbandingan, dan perbaikan kinerja. Sebagai langkah terakhir di proses manajemen, pengendalian memberikan kaitan kembali ke perencanaan. Jika manajer tidak mengendalikan, manajer tidak akan mengetahui apakah tujuan telah tercapai.

5. Kawasan Pertanian

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, kawasan pertanian termasuk ke dalam kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

6. KP2B

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dimaksudkan untuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari laju konversi lahan pertanian dan menyelamatkan lahan pertanian pangan dari kebutuhan konsumsi lahan diluar pertanian, disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (UU No. 41 tahun 2009).

7. Arahannya Kemampuan Lahan Pertanian

Arahannya tata ruang pertanian di Kecamatan Bantimurung bertujuan untuk mendapatkan arahannya pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahan Pertanian. Selanjutnya keluarannya adalah peta kesesuaian lahan pertanian yang di kutip dari pedoman permen PU No.20 tahun 2007.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAMASA

1. Wilayah Administrasi

Secara administrasi Kabupaten Mamasa memiliki luas 3.005,88 km² yang berada pada koordinat antara 119°00'49" - 119°32'27" Bujur Timur, serta 2°40'00" hingga 03°12' 00 Lintang Selatan, Kabupaten Mamasa merupakan 1 dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dengan ketinggian mencapai 3.000 meter diatas permukaan laut. Pada tahun 2019, Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 wilayah kecamatan. Secara geografis batas wilayah Kabupaten Mamasa sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

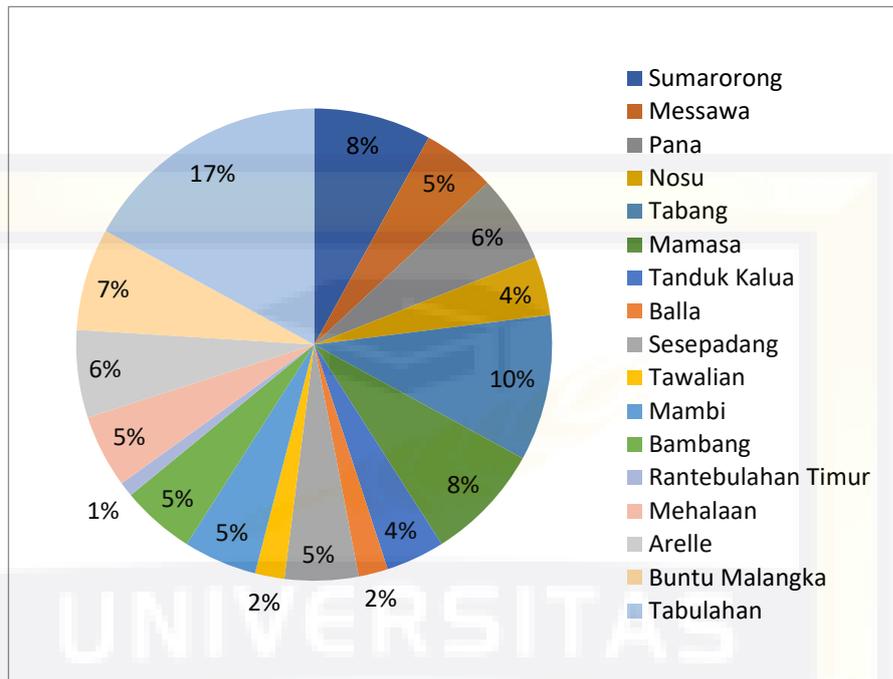
Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 wilayah kecamatan dan terbagi lagi menjadi 13 Kelurahan dan 168 desa. Adapun kelurahan di Kabupaten Mamasa yaitu Tabone, Sumarorong, Messawa, Pana, Nosu, Tabang,

Mamasa, Minake, Tawalian, Mambi, Talipukki, Aralle, Lakahang. Kecamatan Bambang merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 20 Kelurahan/desa, sedangkan Kecamatan Tawalian adalah kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu hanya 4 Kelurahan/desa. Adapun Luas wilayah Kabupaten Mamasa menurut kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Sumarorong	254,00	8
2.	Messawa	150,88	5
3.	Pana	181,27	6
4.	Nosu	113,33	4
5.	Tabang	304,51	10
6.	Mamasa	250,07	8
7.	Tanduk Kalua	120,85	4
8.	Balla	59,53	2
9.	Sesepadang	152,70	5
10.	Tawalian	45,99	2
11.	Mambi	142,66	5
12.	Bambang	136,77	5
13.	Rantebulahan Timur	31,87	1
14.	Mehalaan	162,43	5
15.	Arelle	173,96	6
16.	Buntu Malangka	211,71	7
17.	Tabulahan	513,95	17
Kabupaten Mamasa		3.005,88	100

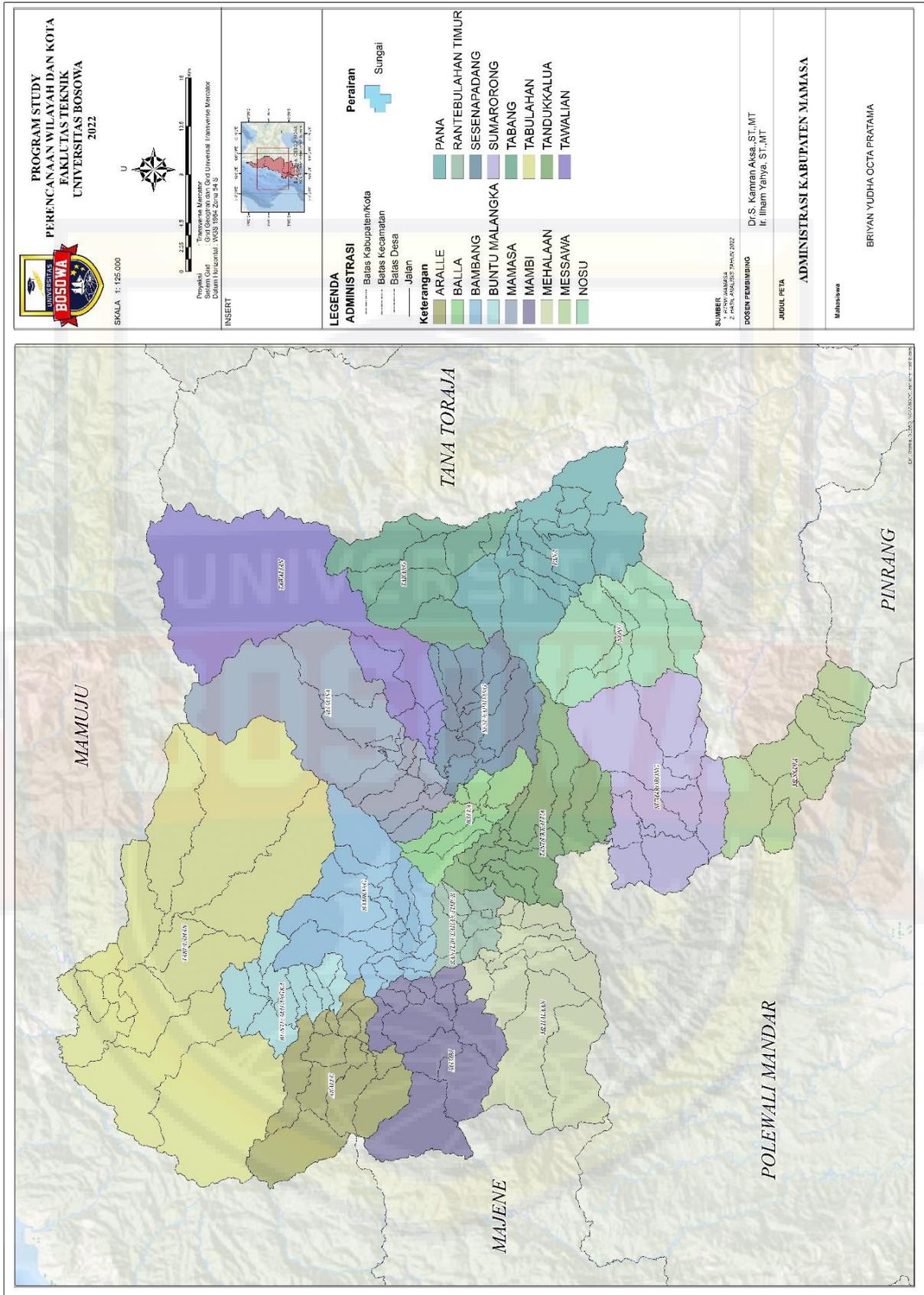
Sumber: BPS Kabupaten Mamasa, 2020



Gambar 4.1 Diagram Persentase Luas Wilayah Kabupaten Mamasa

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa, 2020

Berdasarkan data tabel dan diagram diatas, diantara 17 kecamatan, Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 513,95 km² atau 17% dari total wilayah Kabupaten Mamasa. Untuk kecamatan Rantebulahan Timur merupakan kecamatan yang paling kecil wilayahnya dengan luas hanya 31,87 km². Kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota kabupaten yaitu kecamatan Pana yang berjarak 92 km dari ibu kota Kabupaten Mamasa.



Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Mamasa

2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng merupakan bentuk dari variasi perubahan permukaan bumi secara global, regional atau dikhususkan dalam bentuk suatu wilayah tertentu. Variabel yang digunakan dalam pengidentifikasian kemiringan lereng adalah sudut kemiringan lereng, titik ketinggian di atas muka laut dan bentang alam berupa bentukan akibat gaya satuan geomorfologi yang bekerja.

Secara definisi bahasanya lereng merupakan bagian dari bentang alam yang memiliki sudut miring dan beda ketinggian pada tempat tertentu, sehingga dapat ditarik suatu nilai bahwa dari sudut (kemiringan) lereng merupakan suatu variabel beda tinggi antara dua tempat, yang dibandingkan dengan daerah yang relatif lebih rata atau datar. Adapun dapat diklasifikasikan pengelompokan sudut lereng yang terdapat di Kabupaten Mamasa, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamasa

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase
1	2-5	931,21	37%
2	5-15	1096,01	44%
3	15-40	212,68	9%
4	> 40	251,59	10%
Total		2491,49	100%

Sumber : Hasil Olahan Argis 2022

b. Jenis Tanah

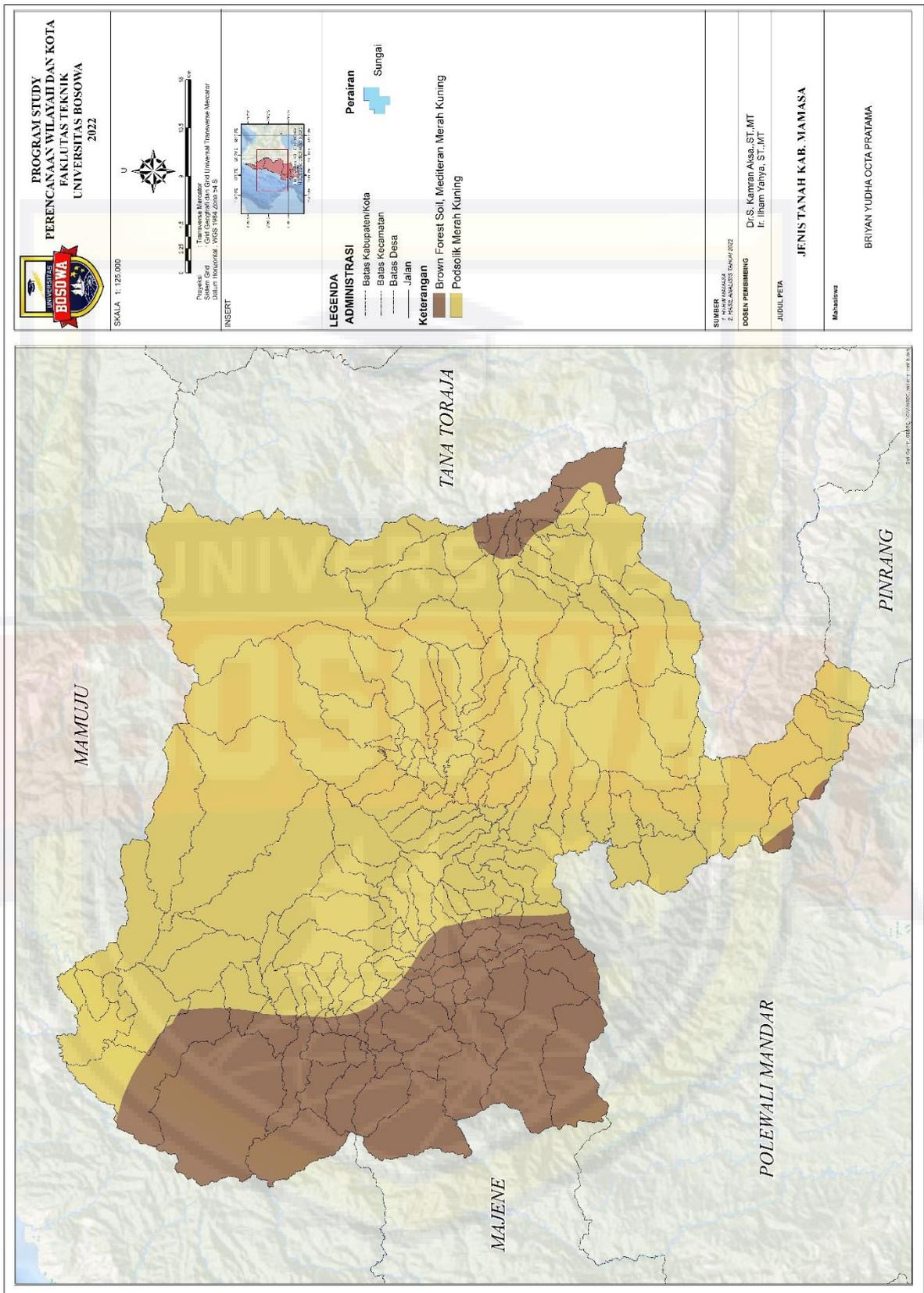
Kabupaten Mamasa memiliki jenis tanah yang bervariasi, dimana jenis tanah yang mendominasi Kabupaten Mamasa adalah Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning 7. Inceptisols yang merupakan jenis tanah di wilayah humida yang mempunyai horizon teralterasi, tetapi tidak menunjukkan adanya iluviasi, eluviasi dan pelapukan yang eksterm. Jenis tanah ekuivalen dengan jenis tanah ini adalah tanah brown forest, glei humik dan glei humik rendah,

Tipe tanah podsolik merah-kuning (PMK) adalah jenis tanah mineral tua dengan ciri warna kekuningan atau kemerahan. Warna kuning dan merah disebabkan karena longgokan besi dan aluminum yang teroksidasi. Mineral lempung penyusunnya didominasi oleh silikat. Batasan yang dibuat oleh USDA adalah "sekelompok tanah masam yang perkembangannya lanjut, dengan atusan (drainasi) baik, memiliki horizon organik dan organik-mineral yang tipis di atas horizon tercuci berwarna cerah di atas horizon yang lebih berlempung berwarna merah, merah kekuningan, atau kuning. Untuk sebaran jenis tanah Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Mamasa

Jenis	Total
Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning	74193,78247
Podsolik Merah Kuning	220297,0093
Total	294490,7918

Sumber : Hasil Olahan Argis 2022



Gambar 4. 4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Mamasa

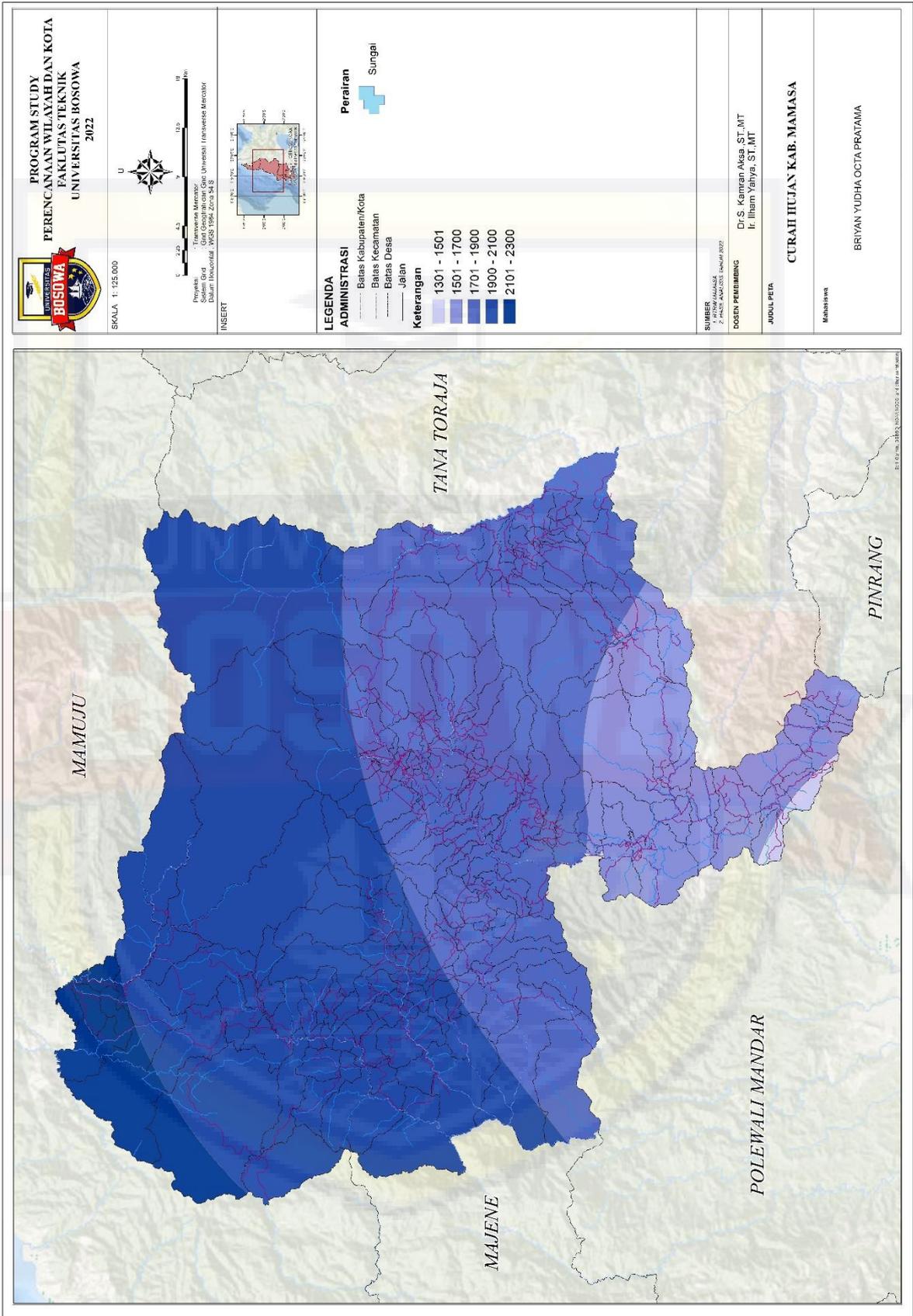
c. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Mamasa beriklim tropis yang terbagi atas dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi curah hujan dan rata-rata hari hujan di Kabupaten Mamasa bervariasi. Hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan 28 hari hujan, sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan Oktober dengan 15 hari hujan. Curah hujan di Kabupaten Mamasa berkisar antara 69 mm³ sampai 267 mm³. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan 267 mm³ dan terendah pada bulan September dengan 69 mm³. Selengkapnya diuraikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Mamasa

Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
Januari	199	24
Februari	143	22
Maret	162	23
April	221	25
Mei	174	21
Juni	169	28
Juli	191	22
Agustus	176	17
September	69	18
Oktober	80	15
November	267	24
Desember	195	27

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa, 2020



Gambar 4.5 Peta Cura Hujan Kabupaten Mamasa

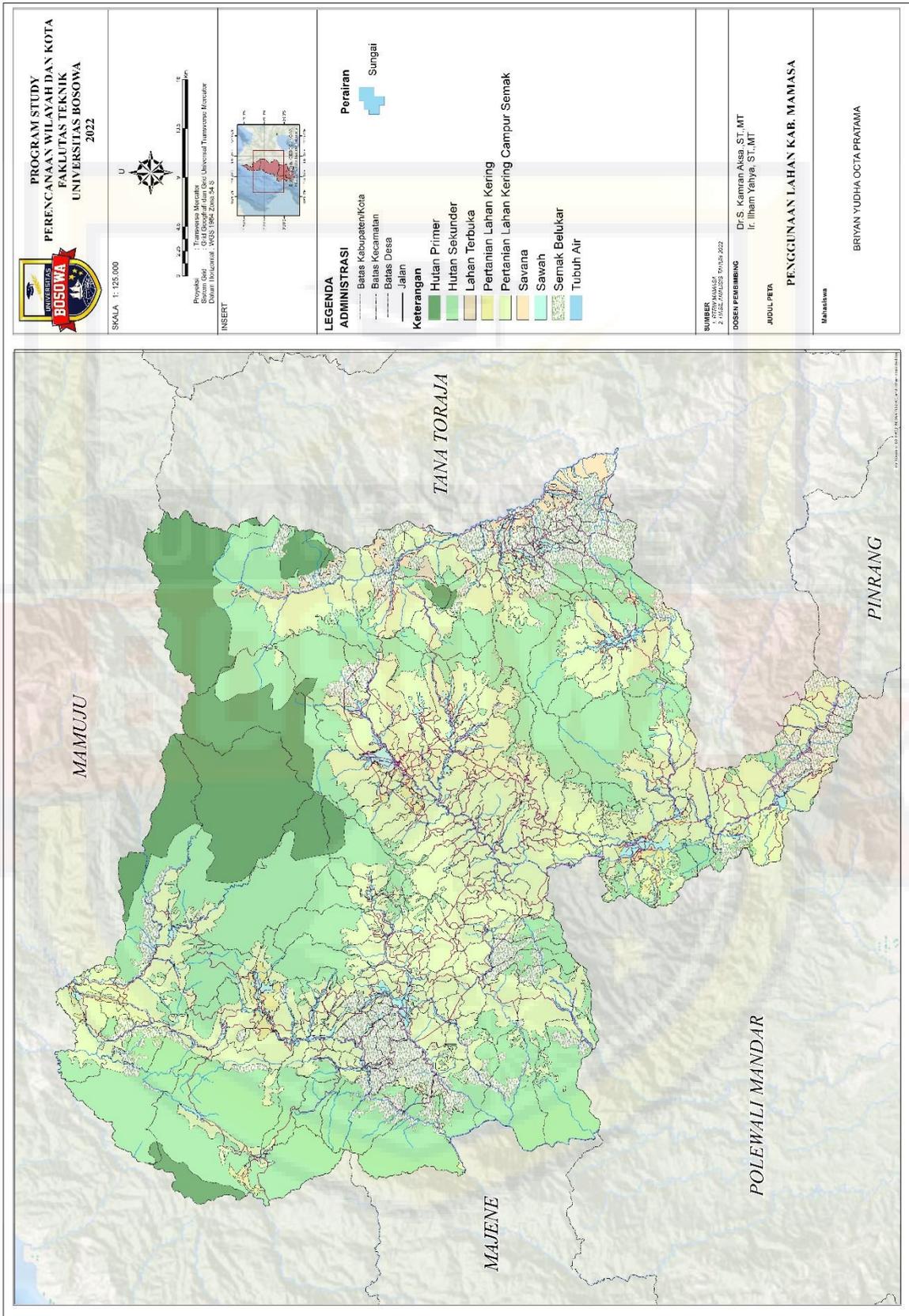
d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan luas lahannya tetap. Pertambahan penduduk dan perkembangnya tuntutan hidup yang akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai wadah semakin meningkat.. Penggunaan lahan di Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Mamasa

Penggunaan Lahan	Total	Persentase
Hutan Primer	34758,72892	11,80%
Hutan Sekunder	107624,238	36,55%
Lahan Terbuka	565,6934701	0,19%
Pertanian Lahan Kering	3634,565378	1,23%
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	109010,2725	37,02%
Savana	2376,028697	0,81%
Sawah	6146,086933	2,09%
Semak Belukar	29476,80905	10,01%
Tubuh Air	898,3688636	0,31%
Total	294490,7918	100,00%

Sumber : Shapefile Penggunaan Lahan Kabupaten Marmasa



Gambar 4. 6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mamasa

3. Demografi

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Mamasa tahun 2019 sebanyak 161.971 jiwa yang terdiri atas 81.896 jiwa penduduk laki-laki dan 80.075 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Mamasa meningkat sekitar 21.889 jiwa dari tahun 2010 (SP 2010), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63 persen. Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 27.292 jiwa (16,85% dari total populasi), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Mehalaan sebesar 4.582 jiwa (2,83% dari total populasi). Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa Dirinci

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Sumarorong	11.160	6,89
Messawa	7.549	4,66
Pana	9.175	5,66
Nosu	4.693	2,90
Tabang	6390	3,95
Mamasa	27.292	16,85
Tanduk Kalua	12.266	7,57
Balla	6.767	4,18
Sesenapadang	8.322	5,14
Tawalian	8.173	5,05

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Mambi	10.661	6,58
Bambang	11.565	7,14
Rantebulahan Timur	6.903	4,26
Mehalaan	4.582	2,83
Aralle	7.151	4,41
Buntu Malangka	7.944	4,90
Tabulahan	11.382	7,03
Mamasa	161.971	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa, 2020

b. Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau pengelompokan jumlah penduduk yang didasarkan pada batasan administrasi wilayah yang bersangkutan. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut.

Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Rantebulahan Timur dengan kepadatan sebanyak 216,60 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tabang sebanyak 20,98 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa bervariasi tiap-tiap kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamasa Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Sumarorong	254,00	11.160	43,94
Messawa	150,88	7.549	50,01
Pana	181,27	9.175	50,62
Nosu	113,33	4.693	41,41
Tabang	304,51	6390	20,98
Mamasa	250,07	27.292	109,14
Tanduk Kalua	120,85	12.266	101,50
Balla	59,53	6.767	113,67
Sesenapadang	152,70	8.322	54,50
Tawalian	45,99	8.173	117,71
Mambi	142,66	10.661	74,73
Bambang	136,77	11.565	84,93
Rantebulahan Timur	31,87	6.903	216,60
Mehalaan	162,43	4.582	28,21
Aralle	173,96	7.151	41,11
Buntu Malangka	211,71	7.944	37,52
Tabulahan	513,95	11.382	22,15
Mamasa	3.005,88	161.971	53,88

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa, 2020

Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa dipengaruhi oleh perbandingan jumlah penduduk yang mendiami setiap kecamatan terhadap luasan (perubahan luas) wilayah kecamatan. Sedangkan secara keruangan, pada dasarnya

distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa dipengaruhi oleh sistem pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta kemudahan aksesibilitas, sehingga distribusi penduduk lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu berdekatan dengan kota.

B. Gambaran Umum Kawasan Perkotaan Mamasa

1. Wilayah Administrasi

Kawasan Perkotaan Mamasa memiliki luas wilayah sebesar 2.634,37 Ha. Secara administrasi Kawasan Perkotaan Mamasa terbagi menjadi 3 Kecamatan, 11 Desa/Kelurahan, dari 11 Desa/Kelurahan tersebut terdapat 2 yang berstatus Kelurahan yaitu Kelurahan Mamasa dan Kelurahan Tawalian. Adapun batas wilayah Kawasan Perkotaan Mamasa adalah sebagai berikut:

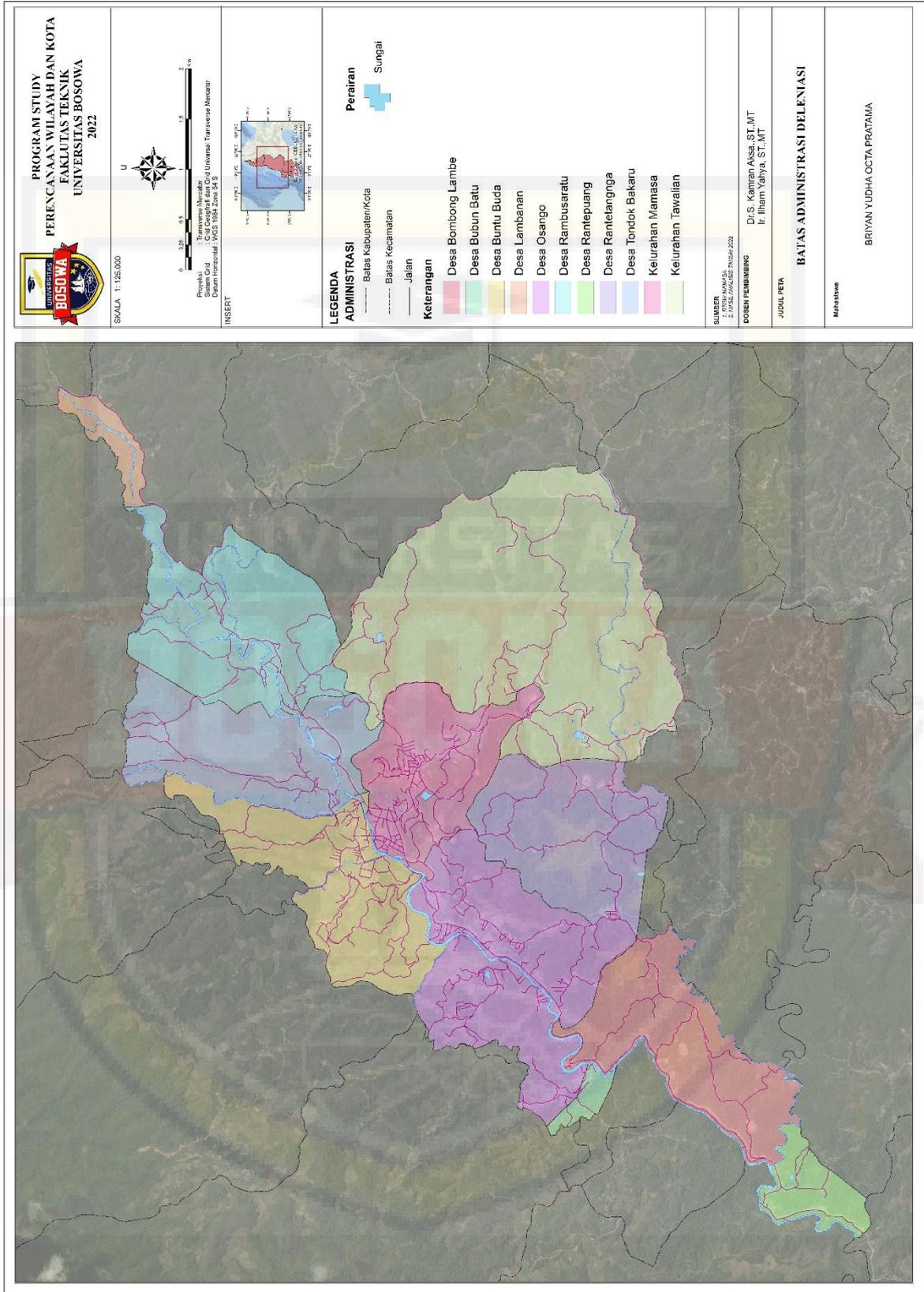
- Sebelah Utara : Kecamatan Bambang dan Kecamatan Tabulahan
- Sebelah Timur : Kecamatan Tabang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tandukkalua
- Sebelah Barat : Kecamatan Balla

Adapun masing-masing luas wilayah Kawasan Perkotaan Mamasa yang masuk pada bagian wilayah perencanaan menurut kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 3.41 berikut ini.

Tabel 4. 8 Luas Wilayah di Kawasan Perkotaan Mamasa

KECAMATAN	DESA	Total	Presentase (%)
Mamasa	Desa Bombong Lambe	226,4670349	8,35
	Desa Bubun Batu	18,13843617	0,67
	Desa Buntu Buda	237,262356	8,91
	Desa Lambanan	35,445082	1,34
	Desa Osango	328,9464289	12,47
	Desa Rambusaratu	274,2970365	15,92
	Desa Tondok Bakaru	232,4807847	8,83
	Kelurahan Mamasa	187,953378	7,15
Mamasa Total		1540,990537	63,65
Sesenapadang	Desa Rantepuang	61,89165164	2,32
Sesenapadang Total		61,89165164	2,32
Tawalian	Desa Rantetangnga	228,6218773	8,98
	Kelurahan Tawalian	659,9864105	25,06
Tawalian Total		888,6082878	34,03
Kawasan Perkotaan Mamasa		2491,490477	100

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa, 2020



Gambar 4. 7 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Mamasa

2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Kondisi Topografi

Kontur merupakan garis tanah yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Ada juga yang mengartikan kontur tanah sebagai tinggi rendahnya suatu tanah atau yang disebut topografi. Tingkat kemiringan pada lereng bisa dilihat dari kontur tanahnya. Untuk menentukan kontur maka dilakukan topografi dengan melihat garis kontur yaitu garis horizontal dan garis tinggi sehingga nantinya akan terlihat naik turunnya suatu permukaan tanah. Garis kontur ini dapat memberikan informasi seputar kemiringan tanah rata-rata (slope), perhitungan galian dan timbunan permukaan tanah.

Berdasarkan hasil analisis, kondisi topografi wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Mamasa memiliki ketinggian dari 1.040 hingga 1.355 mdpl. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 9 Kondisi Topografi di Wilayah Perencanaan

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Ketinggian (mdpl)
Mamasa	Desa Bombong Lambe	1050-1195
	Desa Bubun Batu	1075-1175
	Desa Buntu Buda	1110-1215
	Desa Lambanan	1180-1220
	Desa Osango	1080-1215
	Desa Rambusaratu	1140-1310
	Desa Tondok Bakaru	1135-1255
	Kelurahan Mamasa	1115-1260
Total Mamasa		1050-1310

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Ketinggian (mdpl)
Sesenapadang	Desa Rantepuang	1040-1155
Total Sesenapadang		1040-1155
Tawalian	Desa Rantetangnga	1130-1255
	Kelurahan Tawalian	1170-1355
Total Tawalian		1130-1355
Kawasan Perkotaan Mamasa		1040-1355

Sumber: Hasil Analisis, 2022

b. Kondisi Kemiringan Lereng

Berdasarkan hasil olah data menggunakan analisis GIS, kondisi kemiringan lereng pada wilayah perencanaan memiliki fisik lahan yang bervariasi seperti 0-8% (datar), 8-15% (landai), agak 15-25% (agak curam), dan 25-40% (curam). Adapun kemiringan lereng pada wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Mamasa didominasi oleh kondisi fisik lahan landai dengan kemiringan lereng 8-15% sebesar 1.008,33 Ha atau 38,28%. Adapun kelas lereng di wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Mamasa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Kondisi Kemiringan Lereng di Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Mamasa

Kecamatan	Kelurahan/Desa	Kemiringan Lereng (Ha)				Total (Ha)
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	
Mamasa	Desa Bombong Lambe	36,41	77,05	79,83	26,66	226,46
	Desa Bubun Batu	4,86	4,97	7,44	0,37	18,14
	Desa Buntu Buda	99,89	76,80	53,46	4,52	237,26
	Desa Lambanan	17,57	7,38	7,86	2,60	35,44

	Desa Osango	100,68	122,01	96,90	8,96	328,95
	Desa Rambusaratu	133,70	169,41	100,60	15,65	274,30
	Desa Tondok Bakaru	123,63	67,98	29,43	11,63	232,48
	Kelurahan Mamasa	61,77	75,82	47,54	3,27	187,95
Total Mamasa		578,51	601,42	423,08	73,65	1540,99
Sesenapadang	Desa Rantepuang	7,69	19,03	27,60	6,79	61,89
Total Sesenapadang		7,69	19,03	27,60	6,79	61,89
Tawalian	Desa Rantetangnga	78,45	105,00	53,01	0,00	228,62
	Kelurahan Tawalian	204,89	282,88	172,37	0,00	659,99
Total Tawalian		283,34	387,88	225,38	0,00	888,61
Kawasan Perkotaan Mamasa		869,54	1008,33	676,06	80,44	2491,49
Presentase (%)		33,01	38,28	25,66	3,05	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

c. Jenis Tanah

Tanah sebenarnya merupakan batuan yang telah lapuk dan mengalami proses pembentukan lebih lanjut dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersedimentasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut. Tanah merupakan tubuh alam (natural body) yang terbentuk dan berkembang sebagai akibat bekerjanya gaya – gaya alam (natural force) terhadap bahan –bahan alam (natural material) di permukaan bumi (Hakim 1986).

Gleisol adalah jenis tanah yang perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor lokal, yaitu topografi yang merupakan dataran rendah atau cekungan dan hampir selalu tergenang air. Ciri-ciri tanah gleisol adalah solum tanah sedang, warna kelabu hingga kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlumpur hingga masif, konsistensi lekat dan bersifat asam (pH 4.5 – 6.0). Karena air tanah yang tinggi, gleisol berada dalam keadaan tereduksi pada bagian tanah yang selalu jenuh air. Tidak ada oksigen bebas atau terlarut karena itu tanah berwarna biru kelabu. Dalam mintakat ayunan air tanah ditemukan bercak kecil kehitaman (segresi mangan), sedang di bagian atas beberapa gleisol yang tidak terjangkau oleh air tanah berada dalam keadaan teroksidasi tetap karena itu tidak ada bercak reduksi dan oksidasi (Buringh, 1979).

Tanah Kambisol (menurut sistem FAO) merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, serta tidak terdapat gejala hidromorfik. Nama kambisol berasal dari “kambik” yang berarti berubah atau horison bawah permukaan kambik dan “solum” yang berarti tanah. Ciri-ciri utama horison kambik adalah memiliki tekstur berupa pasir bergeluh halus atau pasir bergeluh sangat halus atau pasir sangat halus, mempunyai kandungan bahan organik rendah, dan tidak mempunyai struktur histik, mollik, dan umbrik.

d. Curah Hujan

Curah hujan tahunan rata – rata 2500-3000 mm/thn dengan rata-rata hari hujan sekitar 16 hari. Daerah Kawasan Perkotaan Mamasa pada dasarnya beriklim tropis dengan dua musim, berdasarkan curah hujan yakni :

- Musim hujan pada periode bulan Oktober sampai Maret
- Musim kemarau pada bulan April sampai September

Beberapa desa di Kawasan Perkotaan Mamasa mempunyai iklim seperti daerah bagian di Sulawesi Barat yakni musim hujan pada periode bulan April sampai September dan musim kemarau dalam bulan Oktober sampai Maret.

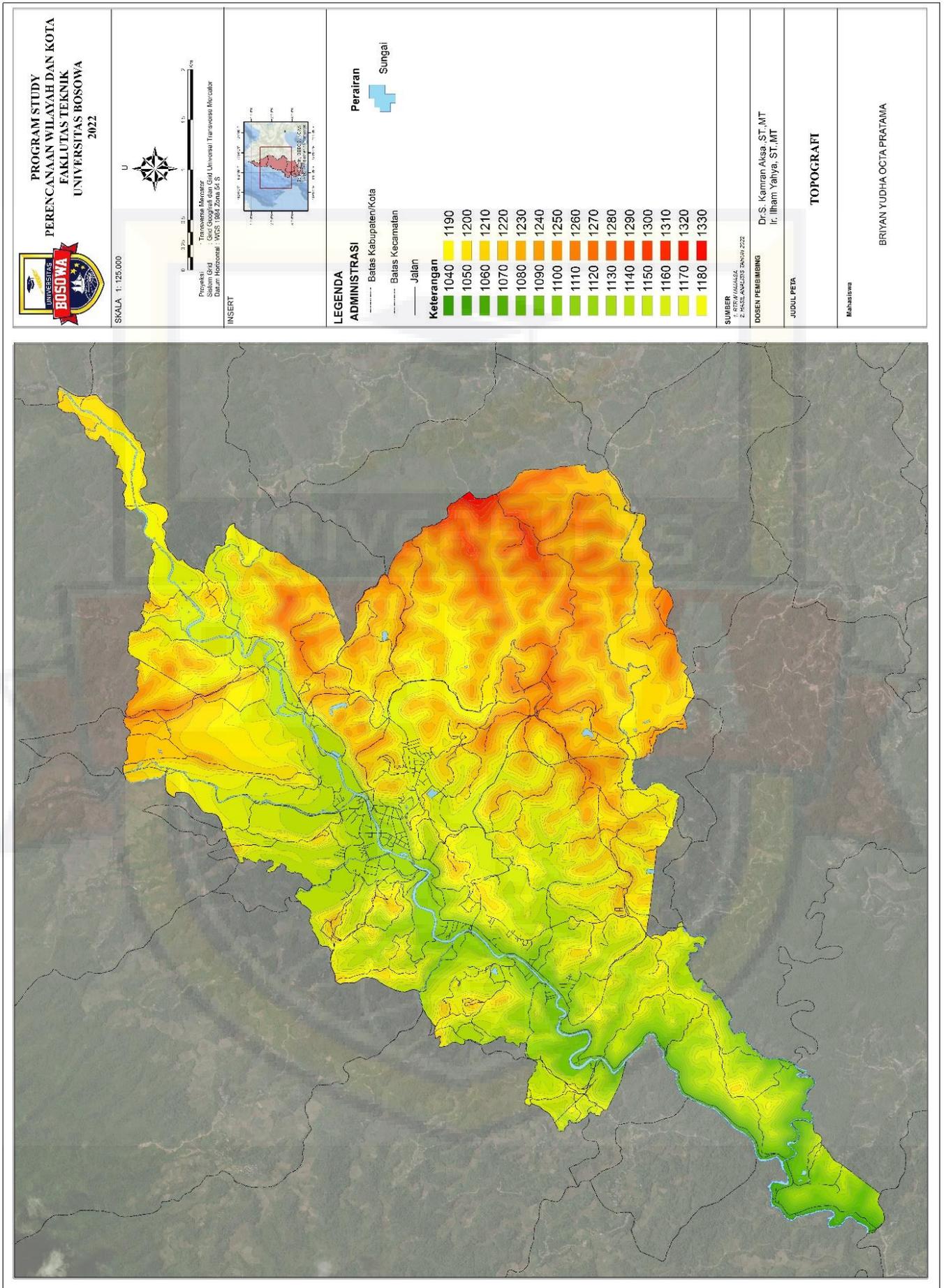
e. Penggunaan Lahan

Sumberdaya lahan di Kawasan Perkotaan Mamasa dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan yang dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kecamatan Mamasa yaitu sawah, tegalan, ladang, perkebunan, padang rumput, hutan rakyat, dan hutan negara. Secara rinci luasan masing-masing penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Mamasa dapat dilihat pada tabel 4.11

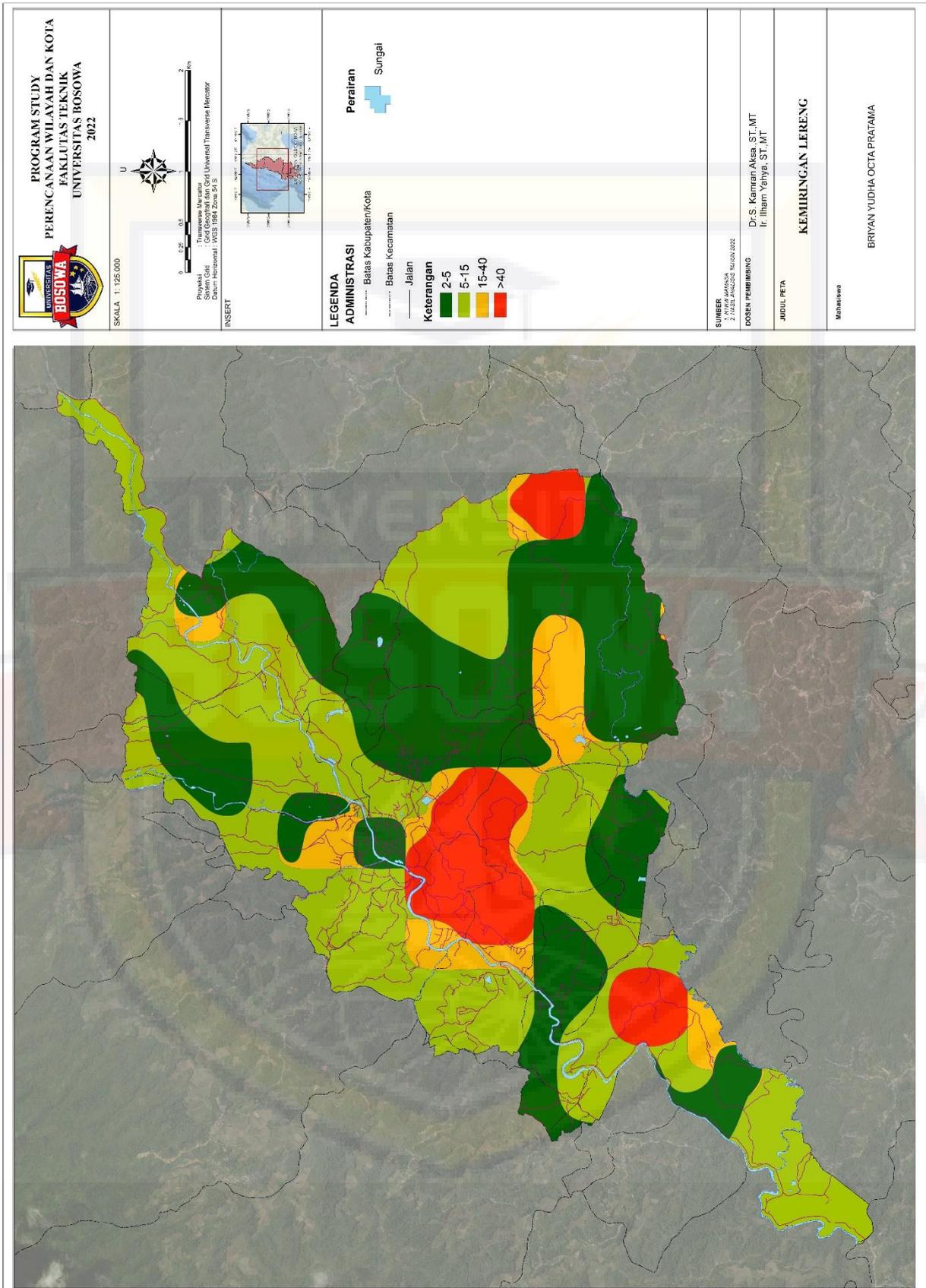
Tabel 4. 11 Luas Lahan dan Penggunaannya di Kawasan Perkotaan Mamasa Menurut Desa/Kelurahan (Hektar)

Penggunaan Lahan	Kecamatan			Kaw. Perkotaan Mamasa
	Mamasa	Tawalian	Sesenapadang	
Sawah Irigasi	1.515	362	899	2.776
Sawah Tadah Hujan	0	0	55	55
Tegalan	1.087	295	558	1.940
Ladang/Huma	1.086	157	234	1.477
Perkebunan	938	617	1.315	2.870
Hutan Rakyat	510	346	1.000	1.856
Padang Rumput	60	60	120	240
Hutan Negara	17.443	1.017	9.170	27.630
Sementara tidak diusahakan	76	400	300	776
Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)	500	100	546	1.146
Total	23.215	3.354	14.197	40.766

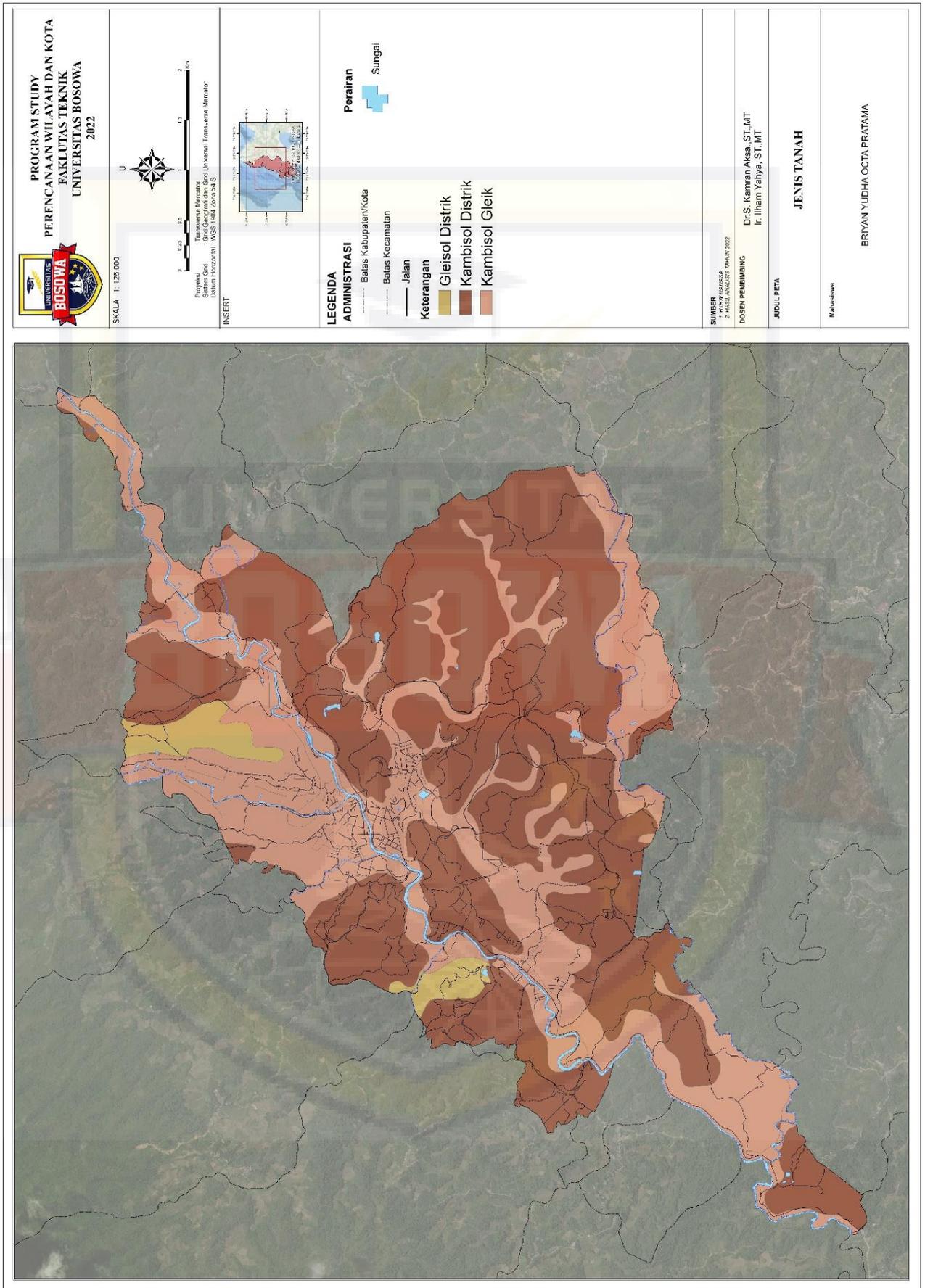
Sumber: Olah data penulis 2022



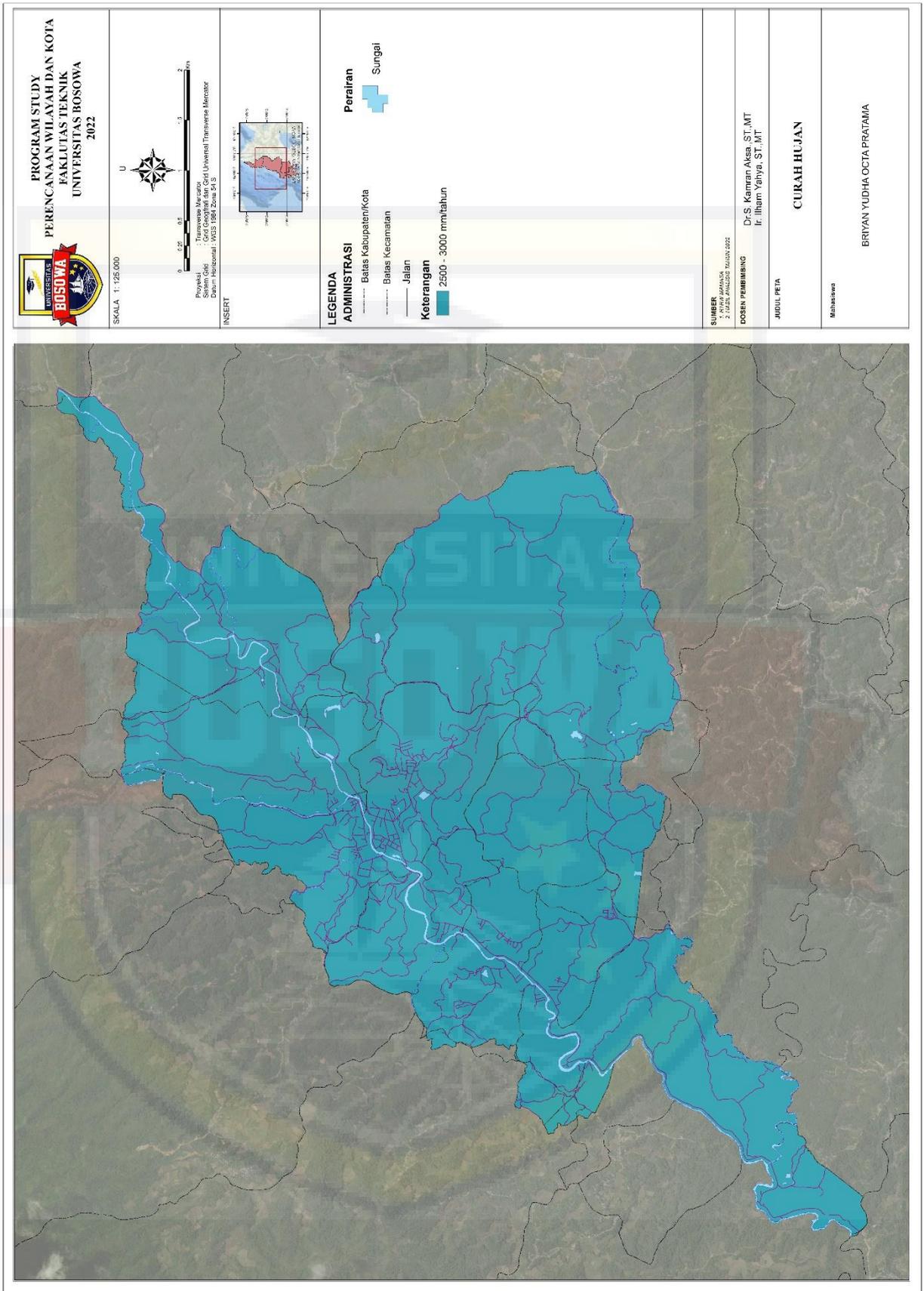
Gambar 4. 8 Peta Topografi Kawasan Perkotaan Mamasa



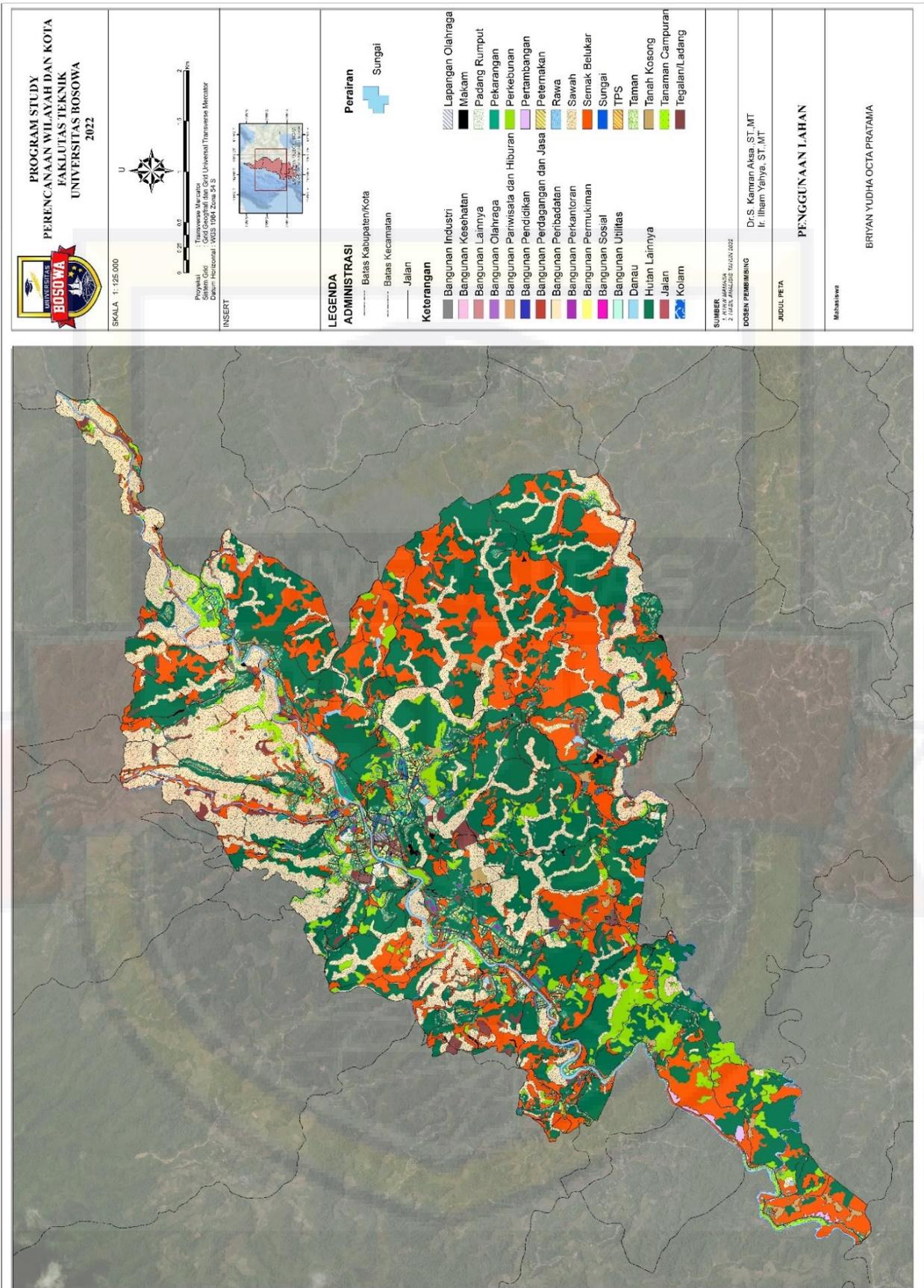
Gambar 4. 9 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 10 Peta Jenis Tanah Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 11 Peta Curah Hujan Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 12 Peta Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Mamasa

f. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kawasan Perkotaan Mamasa pada tahun 2019 sebanyak 28.236 jiwa. Desa/kelurahan dengan penduduk paling sedikit yaitu Desa Rantepuang, Kecamatan Sesenapadang dengan jumlah penduduk 1.079 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Mamasa dengan jumlah penduduk 5.272 jiwa. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12 Jumlah Pendudukan di Kawasan Perkotaan Mamasa Menurut Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk (Jiwa)	Presentase (%)
1	Mamasa	Bombong Lambe	1.334	4,72
2		Bubun Batu	1.157	4,10
3		Buntu Buda	3.218	11,40
4		Lambanan	3.565	12,63
5		Mamasa	5.272	18,67
6		Osango	3.935	13,94
7		Rambu Saratu	2.136	7,56
8		Tondok Bakaru	2.070	7,33
Total Mamasa			22.687	80,35
1	Sesenapadang	Rantepuang	1.079	3,82
Total Sesenapadang			1.079	3,82
1	Tawalian	Rantetangnga	1.454	5,15
2		Tawalian	3.016	10,68
Total Tawalian			4.470	15,83
Kawasan Perkotaan Mamasa			28.236	100

Sumber: BPS Kabupaten Mamasa, 2020

C. ANALISIS TINGKAT KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN

1. Analisis Satuan Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Analisis kemampuan lahan diperoleh dengan menghitung satuan kemampuan lahan dilanjutkan dengan *overlay* menjadi peta kemampuan lahan.

a. Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

SKL morfologi bertujuan melakukan pemilahan dan mengetahui potensi kendala masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap morfologi. Adapun hasil SKL Morfologi Kawasan Perkotaan Mamasa yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 13 SKL Morfologi Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	SKL Morfologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kemampuan Lahan Morfologi Kurang	800.78	32.14%
2.	Kemampuan Lahan Morfologi Sedang	638.72	25.64%
3.	Kemampuan Lahan Morfologi Cukup	1051.99	42.22%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan lahan morfologi di Kawasan Perkotaan Mamasa terdiri atas morfologi kurang dengan luas 800,78 ha, morfologi sedang

seluas 638,72 ha, dan morfologi cukup dengan luas 1051.99 ha atau pada gambar 4.12

b. Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

SKL Kemudahan dikerjakan bertujuan untuk memperoleh gambaran guna mengetahui tingkat kemudahan lahan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan untuk pengembangan kawasan. Adapun SKL Kemudahan dikerjakan pada kawasan perencanaan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 14 SKL Kemudahan Dikerjakan Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	SKL Kemudahan Dikerjakan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kemudahan Dikerjakan Sedang	304.96	12.24%
2.	Kemudahan Dikerjakan Tinggi	2186.53	87.76%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kemudahan dikerjakan di Kawasan Perkotaan Mamasa terdiri atas kemudahan dikerjakan sedang dengan luas 304.96 ha dan kemudahan dikerjakan tinggi dengan luas 2186.53 ha

c. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

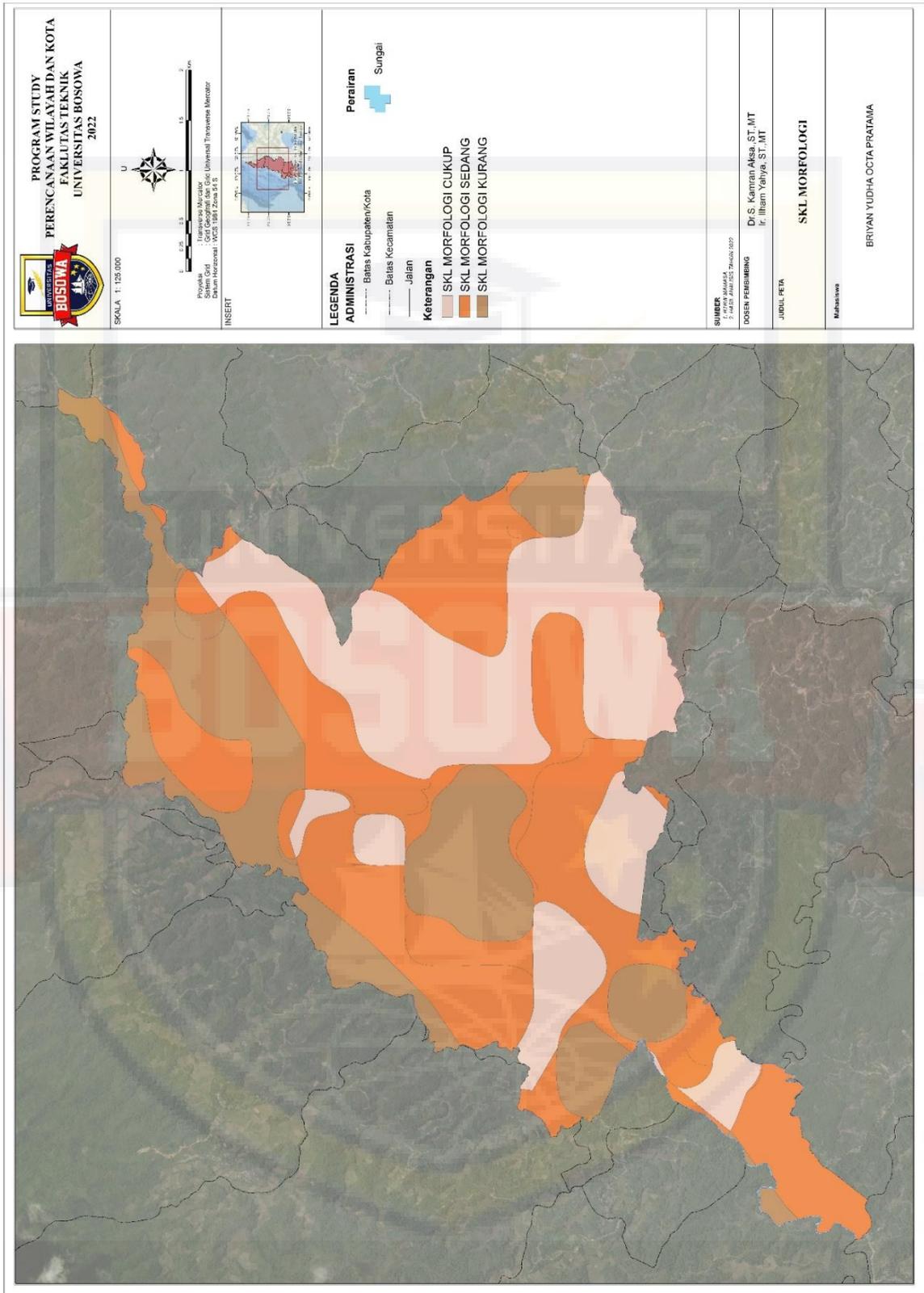
SKL Kestabilan Lereng bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kestabilan lereng untuk pembangunan wilayah, daerah yang berlereng cukup aman untuk dikembangkan dan batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kestabilan lereng. Adapun SKL Kestabilan Lereng pada kawasan perencanaan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 15 SKL Kestabilan Lereng Kawasan Perkotaan Mamasa

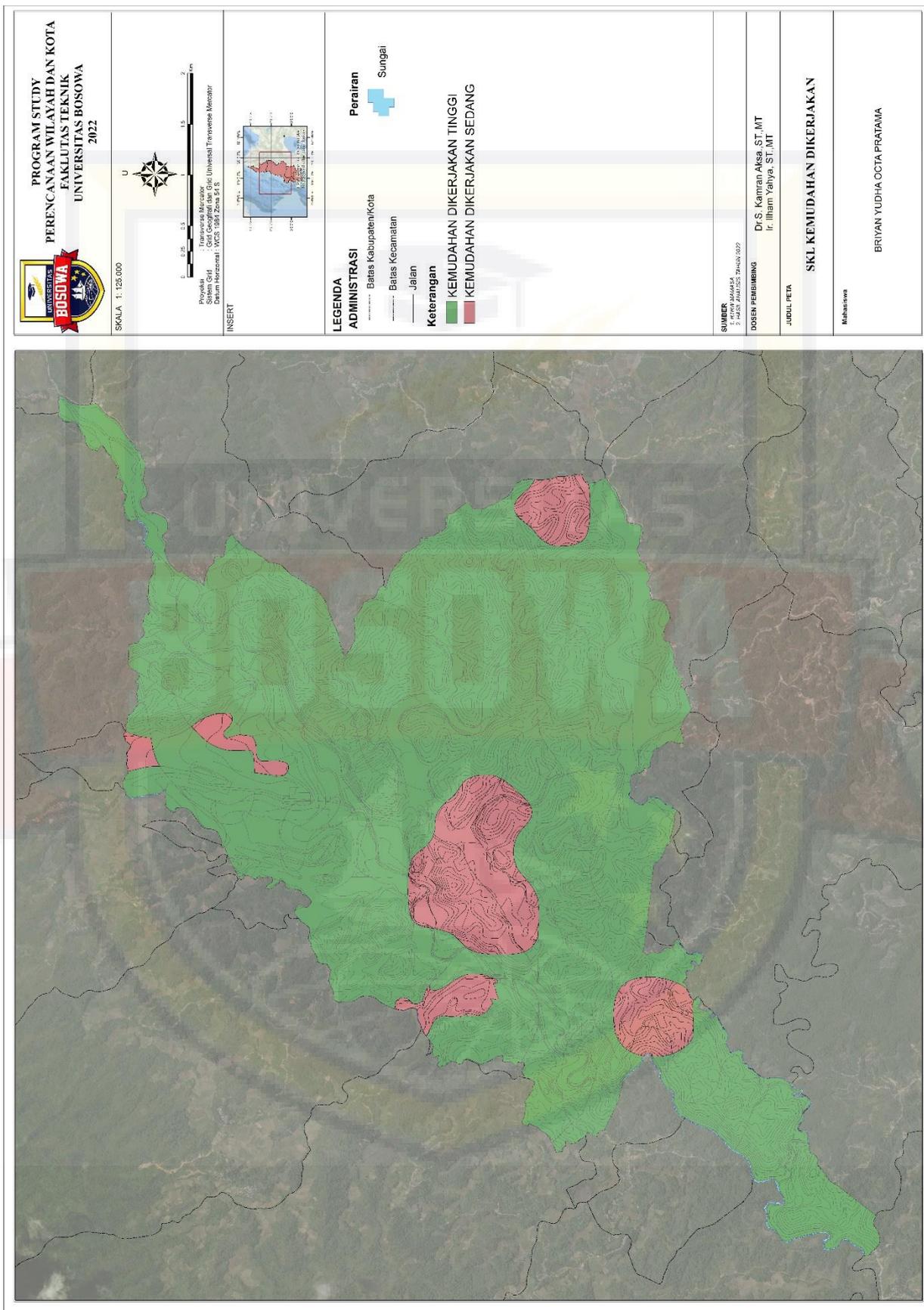
No.	SKL Kestabilan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kestabilan Lereng Kurang	638.72	25.64%
2.	Kestabilan Lereng Sedang	1852.78	74.36%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

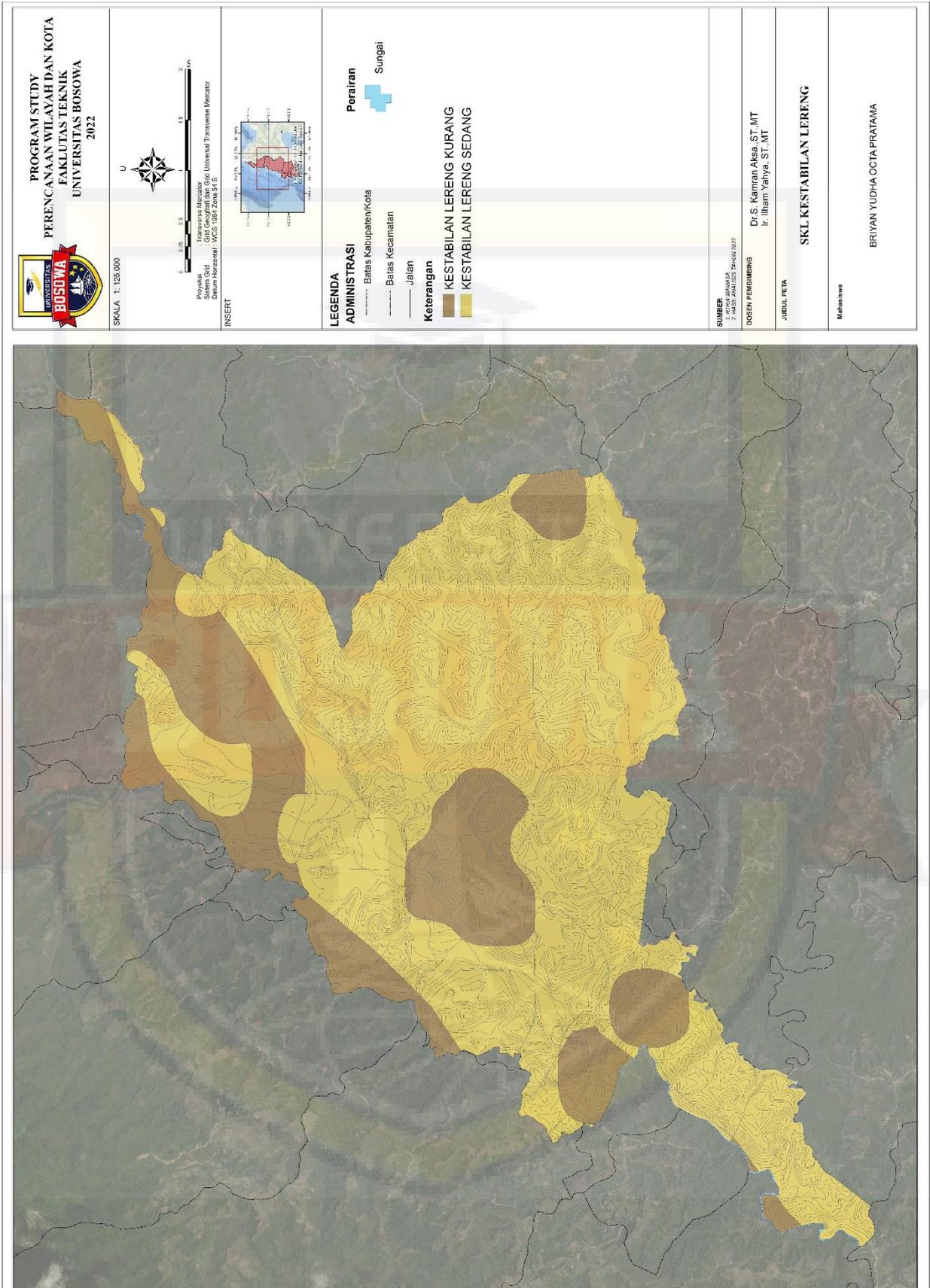
Berdasarkan hasil analisis SKL kestabilan lereng menunjukkan bahwa kestabilan lereng di Kawasan Perkotaan Mamasa didominasi oleh kestabilan lereng sedang dengan luas 1852.78 ha atau sebesar 74.36%



Gambar 4. 13 Peta SKL Morfologi Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 14 Peta SKL Kemudahan Dikerjakan Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 15 Peta SKL Kestabilan Lereng Kawasan Perkotaan Mamasa

d. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi

SKL Kestabilan Pondasi bertujuan untuk memperoleh gambaran daya dukung tanah dan perkiraan jenis pondasi dari masing-masing tingkat kestabilan pondasi. Adapun SKL kestabilan pondasi pada Kawasan Perkotaan Mamasa yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 16 SKL Kestabilan Pondasi Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	SKL Kestabilan Pondasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kestabilan Pondasi Sedang	989.20	60.30%
2.	Kestabilan Pondasi Cukup	1502.29	39.70%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat SKL kestabilan pondasi di Kawasan Perkotaan Mamasa terdiri atas dua, yaitu kestabilan pondasi sedang dengan luas 989.20 ha dan kestabilan pondasi cukup dengan luas 1502.29 ha.

e. Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

SKL Ketersediaan Air bertujuan untuk mengetahui kapasitas air, sumber-sumber air, dan memperoleh gambaran penyediaan air untuk tingkat ketersediaan air.

Tabel 4. 17 SKL Ketersediaan Air Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	SKL Ketersediaan Air	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Ketersediaan Air Sedang	2409.48	96.71%
2.	Ketersediaan Air Tinggi	82.01	3.29%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis SKL ketersediaan air menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan air di Kawasan Perkotaan Mamasa terdiri atas dua, yaitu ketersediaan air sedang dengan luas 2409,48 ha dan ketersediaan air tinggi dengan luas 82.01 ha.

f. Satuan Kemampuan Lahan Untuk Drainase

SKL untuk Drainase bertujuan untuk memperoleh gambaran karakteristik drainase alamiah masing-masing tingkat kemampuan drainase dan cenderung tergenang di musim penghujan. Adapun SKL untuk Drainase dikawasan perencanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 18 SKL Untuk Drainase Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	SKL Untuk Drainase	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Drainase Cukup	2491.49	100%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa SKL untuk drainase pada Kawasan Perkotaan Mamasa hanya memiliki 1 klasifikasi, yaitu drainase cukup.

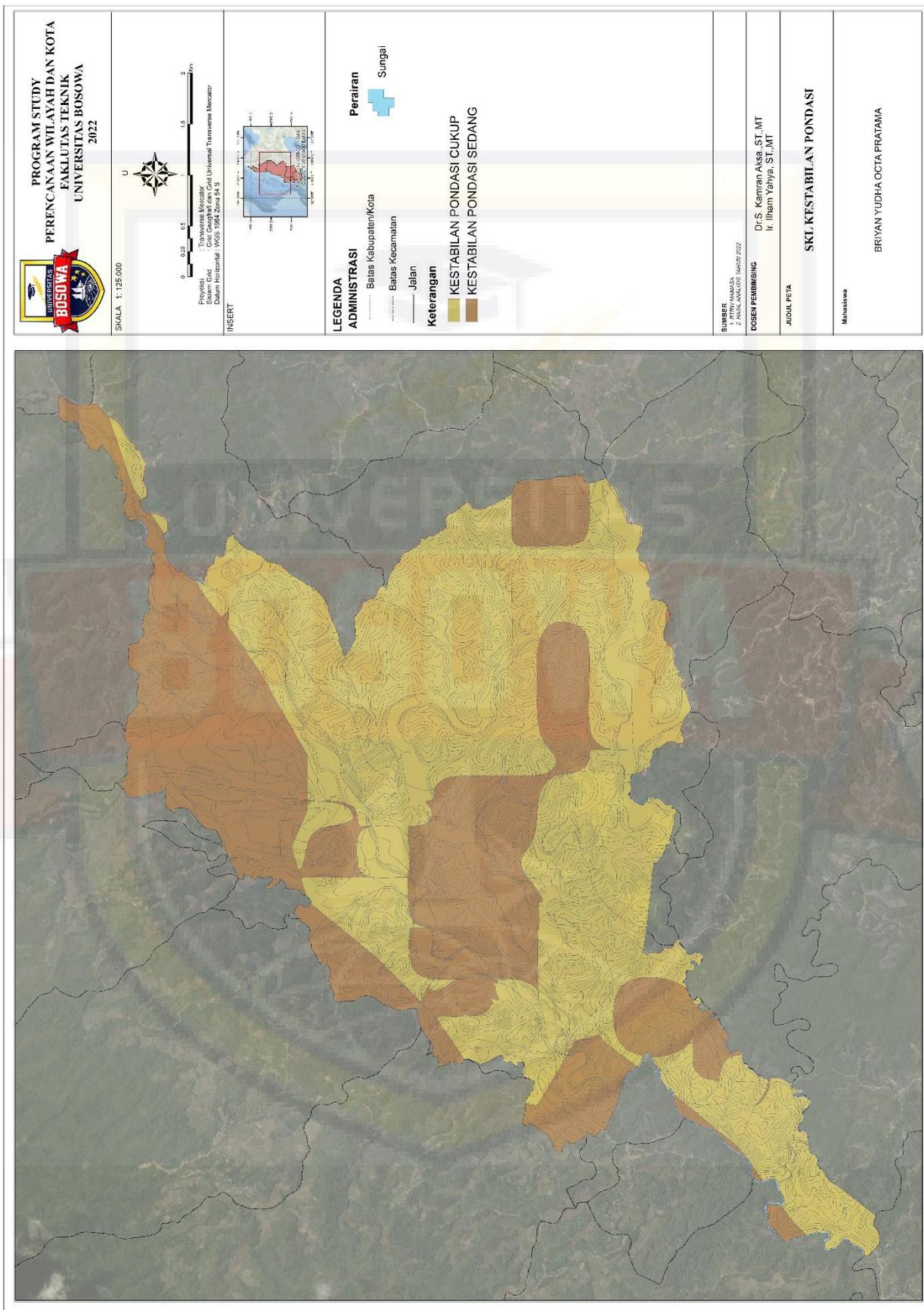
g. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

SKL Terhadap Erosi bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi sertaantisipasi dampaknya terhadap daerah yang lebih hilir.

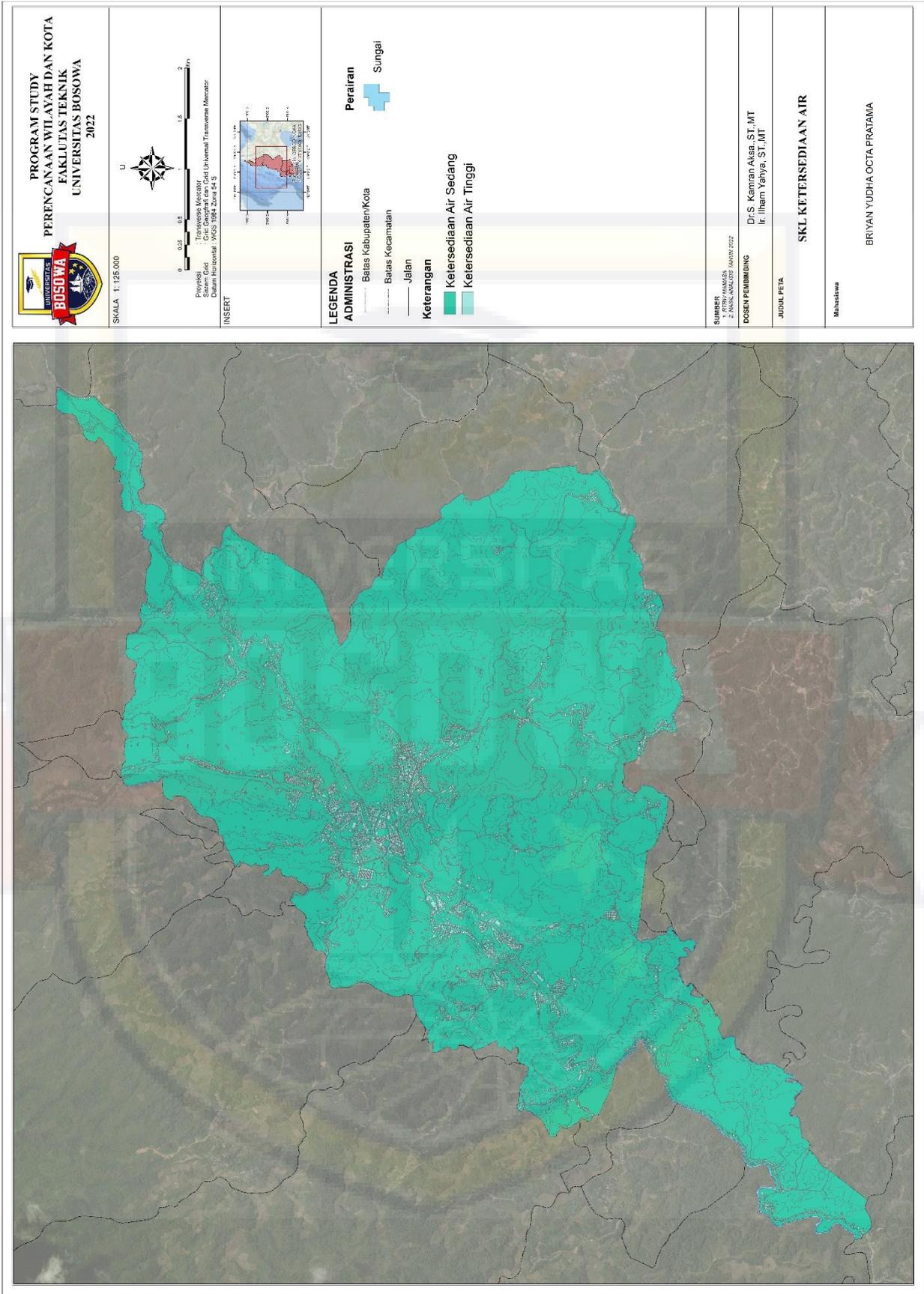
Tabel 4. 19 SKL Terhadap Erosi Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	SKL Terhadap Erosi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	SKL Erosi Cukup	2421.34	97.18%
2.	SKL Erosi Tinggi	70.15	2.82%
Total		2491.49	100%

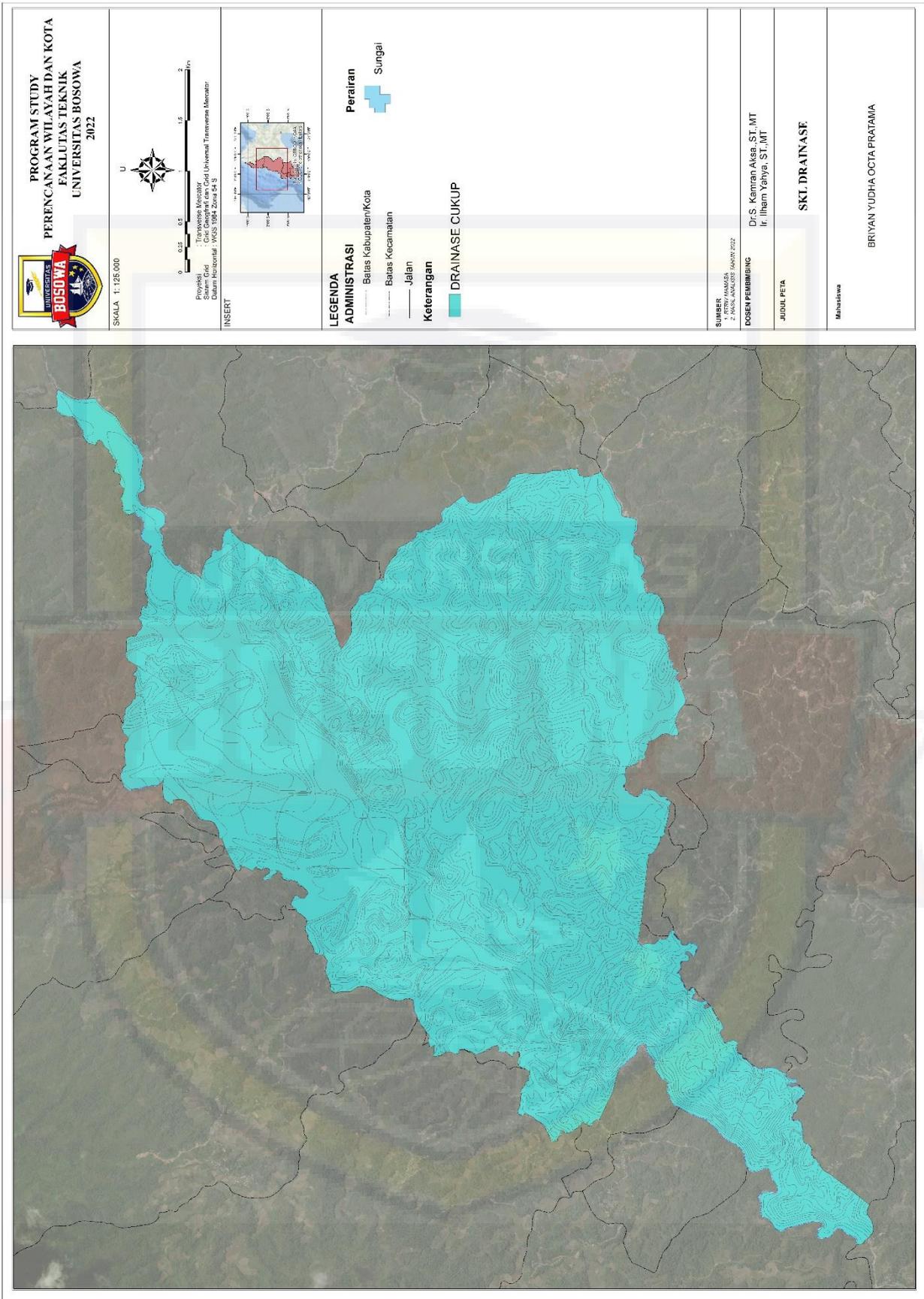
Sumber: Hasil Analisis, 2022



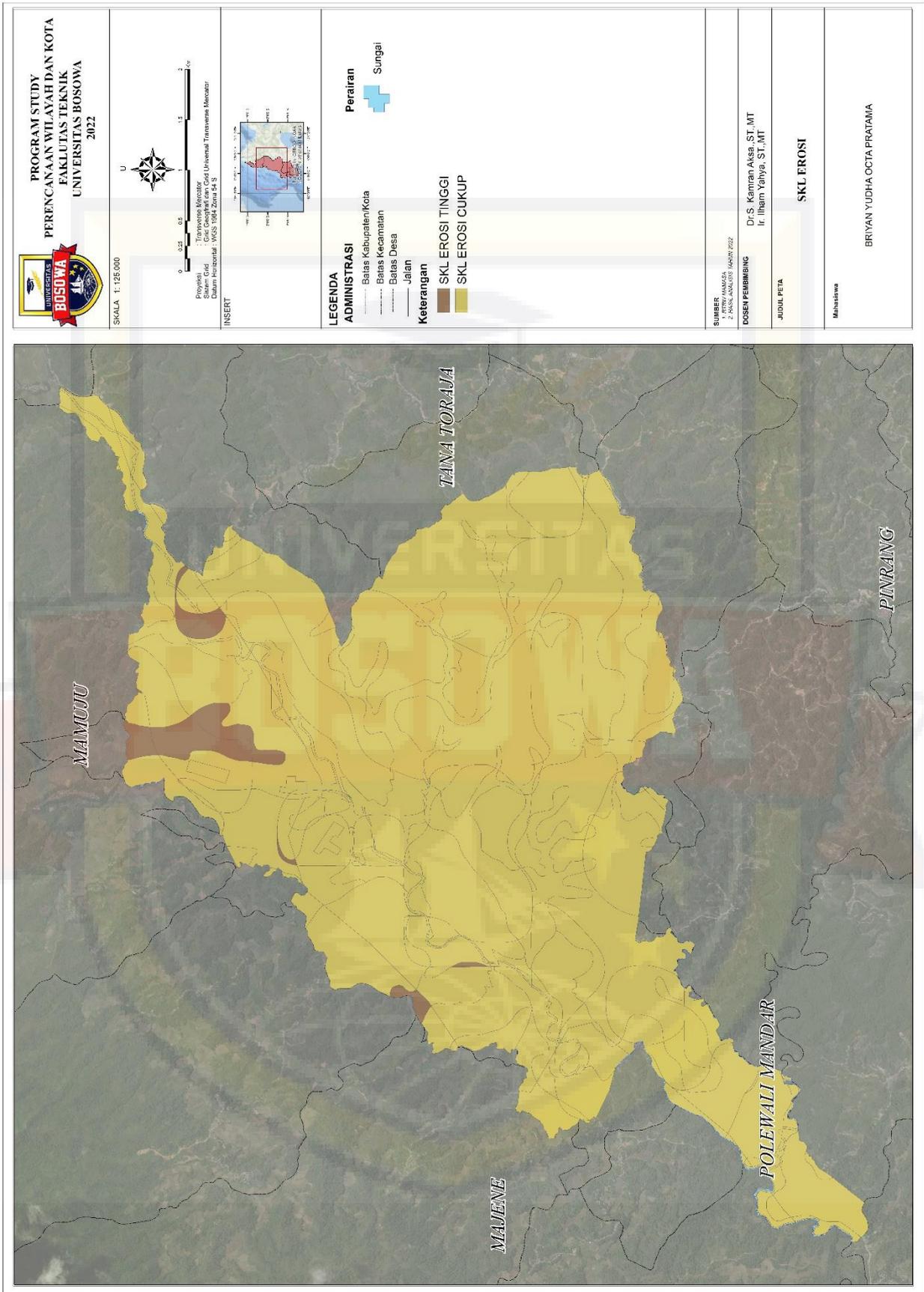
Gambar 4. 16 Peta SKL Kestabilan Pondasi Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 17 Peta SKL Ketersediaan Air Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 18 Peta SKL Untuk Drainase Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 19 Peta SKL Terhadap Erosi Kawasan Perkotaan Mamasa

h. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Bencana

SKL Terhadap Bencana bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. Adapun hasil SKL terhadap bencana pada Kawasan Perkotaan Mamasa yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 20 SKL Terhadap Bencana Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	SKL Terhadap Bencanna	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Rawan Sedang	2491.49	100%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa SKL terhadap bencana pada Kawasan Perkotaan Mamasa hanya memiliki 1 klasifikasi, yaitu rawan sedang.

2. Analisis Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Sedangkan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan

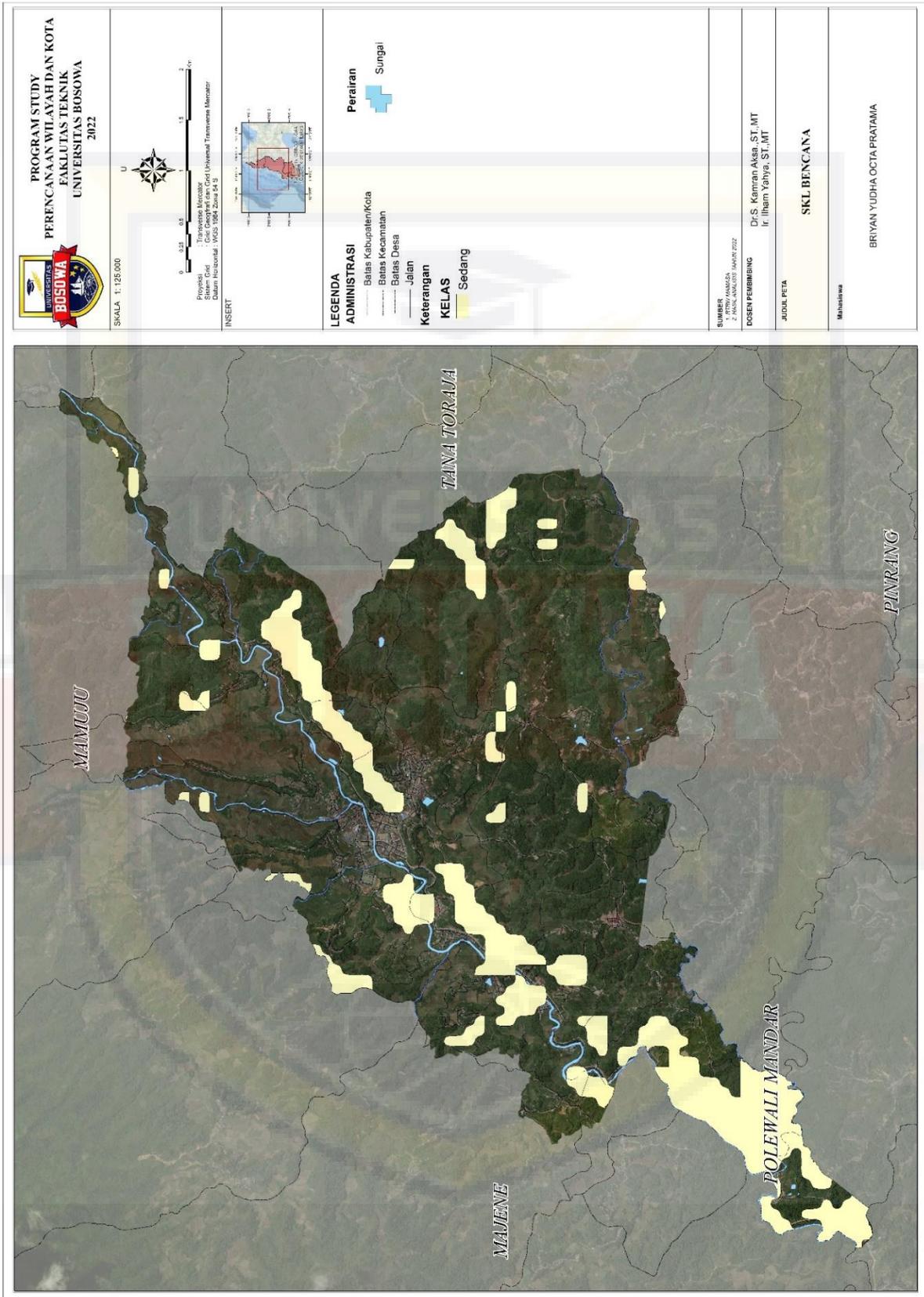
manusia dan makhluk hidup lain. Adapun hasil analisis kemampuan lahan Kawasan Perkotaan Mamasa adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 21 Analisis Kemampuan Lahan Kawasan Perkotaan Mamasa

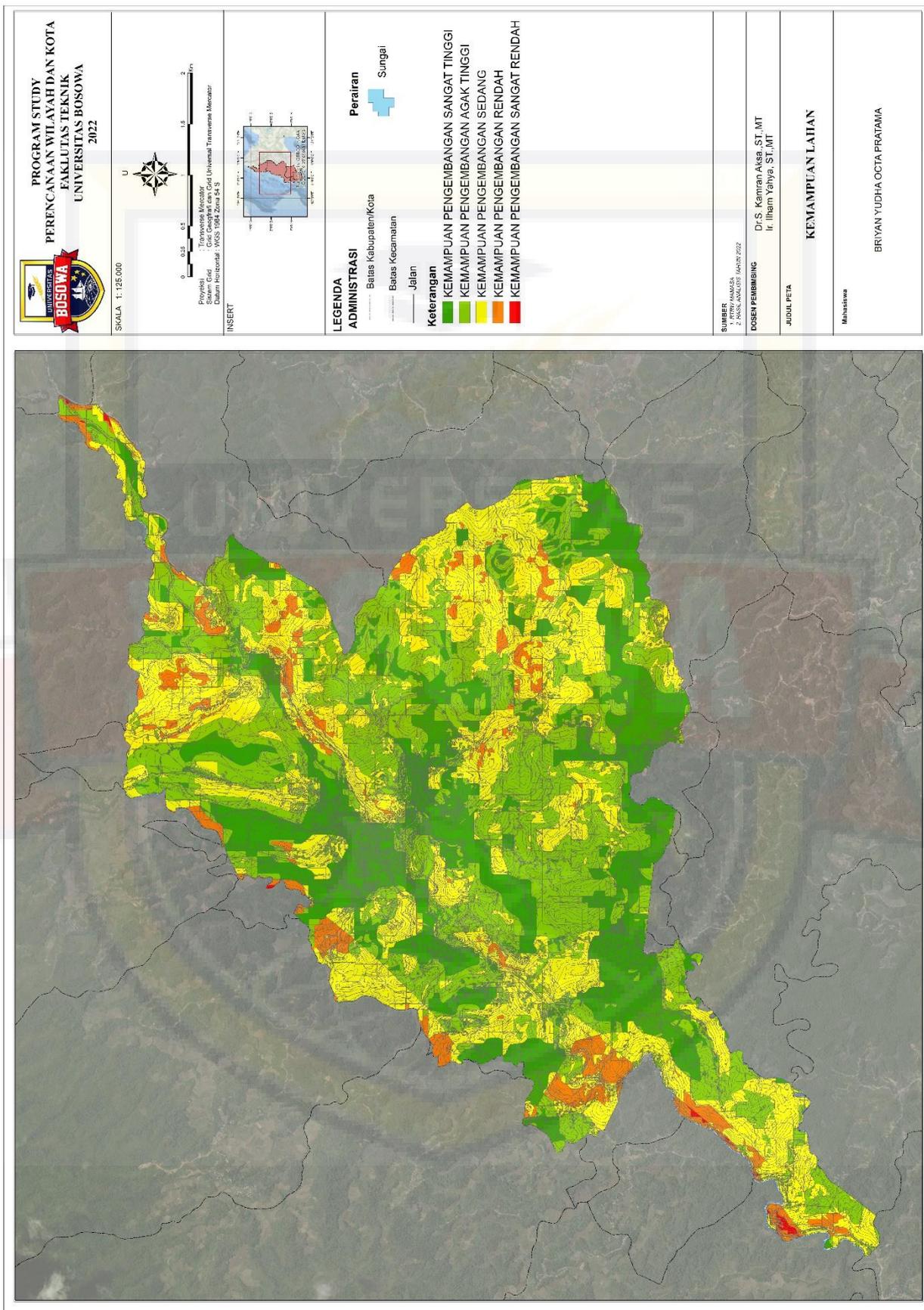
No.	Kemampuan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	3.84	0.15%
2.	Kemampuan Pengembangan Rendah	139.33	5.59%
3.	Kemampuan Pengembangan Sedang	809.97	32.51%
4.	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	893.05	35.84%
5.	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	645.30	25.90%
Total		2491.49	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan lahan terbesar di Kawasan Perkotaan Mamasa yaitu kemampuan pengembangan agak tinggi dengan luas 893.05 ha atau 35.84% dari keseluruhan luas kemampuan lahan, sedangkan kemampuan lahan terkecil yaitu kemampuan pengembangan sangat rendah dengan luas 3.84 ha. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada gambar 4.21



Gambar 4. 20 Peta SKL Terhadap Bencana Kawasan Perkotaan Mamasa



Gambar 4. 21 Peta Analisis Kemampuan Lahan Kawasan Perkotaan Mamasa

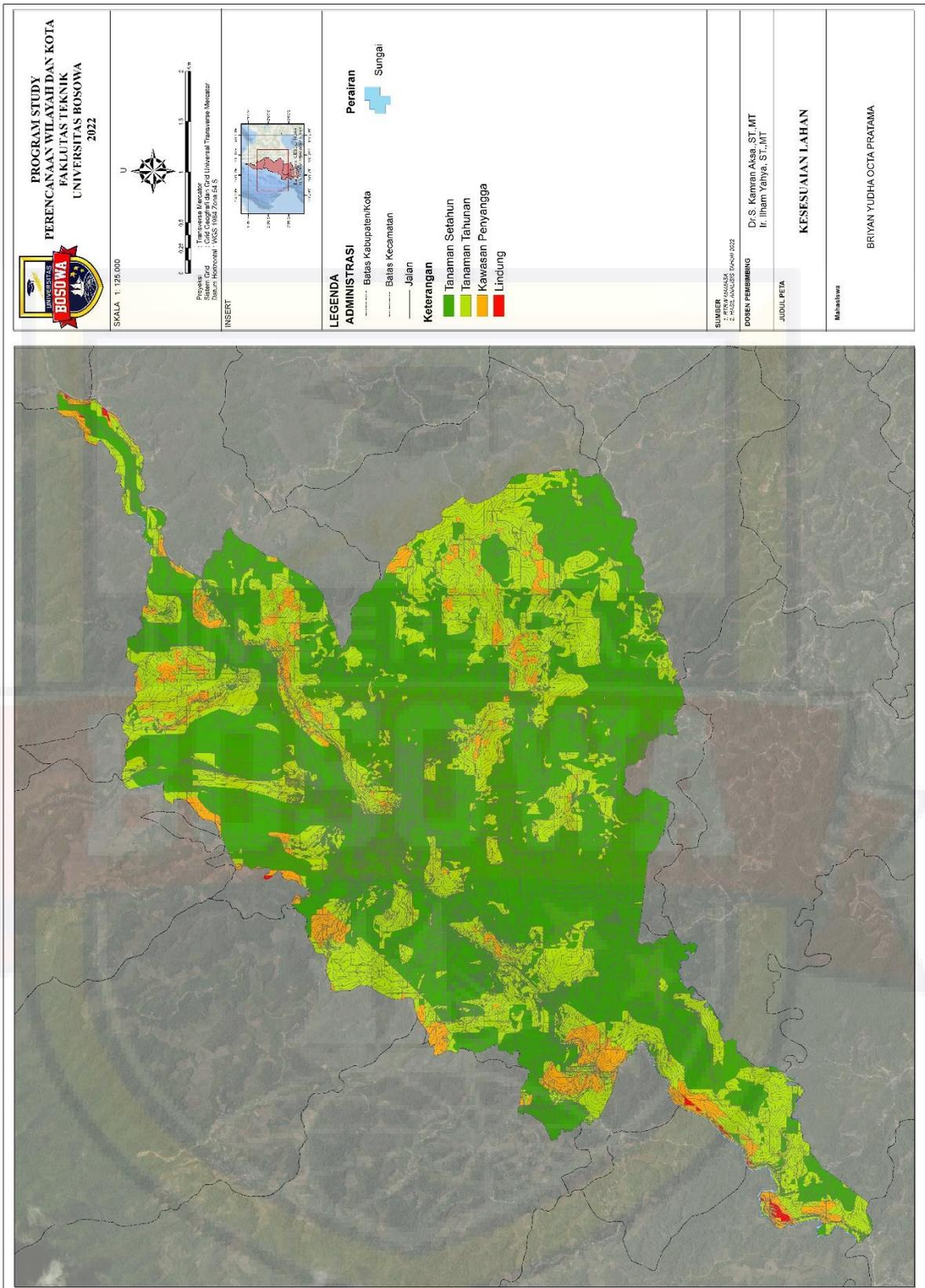
3. Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian

Analisis kesesuaian lahan merupakan tahap lanjutan dari hasil analisis kemampuan dimana memberikan arahan rekomendasi guna mengembangkan suatu daerah. Arahan tata ruang pertanian bertujuan untuk mendapatkan arahan pengembangan sesuai dengan kesesuaian lahannya. Adapun data yang dibutuhkan ialah peta kemampuan lahan yang keluarannya akan menghasilkan peta arahan tata ruang pertanian. Adapun hasil analisis kesesuaian lahan pertanian pada Kawasan Perkotaan Mamasa yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 22 Arahan Tata Ruang Pertanian Kawasan Perkotaan Mamasa

No.	Kelurahan/Desa	Kawasan Penyangga (ha)	Lindung (ha)	Tanaman Setahun (ha)	Tanaman Tahunan (ha)
1.	Bombong Lambe	27,45	1,02	115,95	82,05
2.	Bubun Batu	3,16	-	6,82	8,16
3.	Buntu Buda	18,19	0,26	147,07	71,75
4.	Lambanan	5,37	0,77	17,53	11,78
5.	Mamasa	3,28	-	139,32	45,35
6.	Osango	17,65	-	211,36	99,93
7.	Rambusaratu	25,28	-	140,48	108,53
8.	Rantepuang	9,38	1,80	19,07	31,64
9.	Rantetangga	0,43	-	192,29	35,90
10.	Tawalian	21,34	-	402,08	236,57
11.	Tondok Bakar	7,80	-	146,39	78,29
Total		139,33	3,85	1538,36	809,95

Sumber: Hasil Analisis, 2022



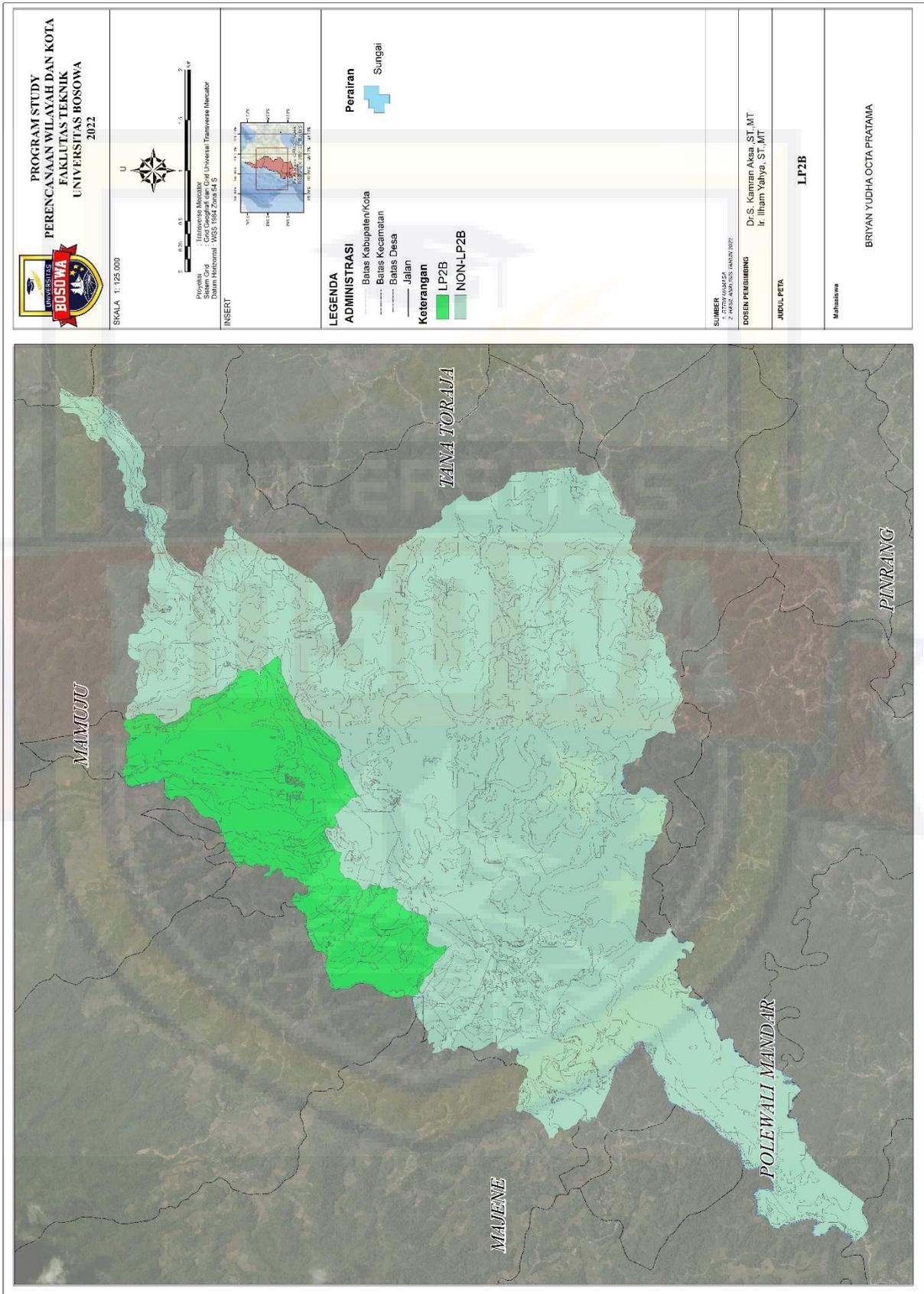
Gambar 4. 22 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Perkotaan Mamasa

Tabel 4. 23 Tabel Kesesuaian Lahan Kawasan Perkotaan Mamasa

No	KESESUAIAN LAHAN	LUASAN (Ha)
1	Kesesuaian Lahan Agak Tinggi Dan LP2B	254,65
2	Kesesuaian Lahan Agak Tinggi Dan NON-LP2B	1283,71
3	Kesesuaian Lahan Rendah Dan LP2B	22,20
4	Kesesuaian Lahan Rendah Dan NON-LP2B	117,13
5	Kesesuaian Lahan Sangat Rendah Dan LP2B	0,25
6	Kesesuaian Lahan Sangat Rendah Dan NON-LP2B	3,58
7	Kesesuaian Lahan Sedang Dan LP2B	123,25
8	Kesesuaian Lahan Sedang Dan NON-LP2B	686,71
TOTAL		2491,502266

Sumber : Hasil Analisis 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian lahan di Kawasan perkotaan mamasa dengan Kesesuaian Lahan Agak Tinggi Dan berada pada kawasan LP2B seluas 254,65 Ha dan Kesesuaian Lahan Agak Tinggi Dan berada pada Kawasan Non LP2B seluas 1283,71 Ha.



Gambar 4. 23 Peta Sebaran LP2B Kawasan Perkotaan Mamasa

PROGRAM STUDY
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2022

UNIVERSITAS BOSOWA

SKALA 1:125.000

U

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : GRS Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zon 48 S

INSERT

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan

Perairan

- Sungai

Keterangan

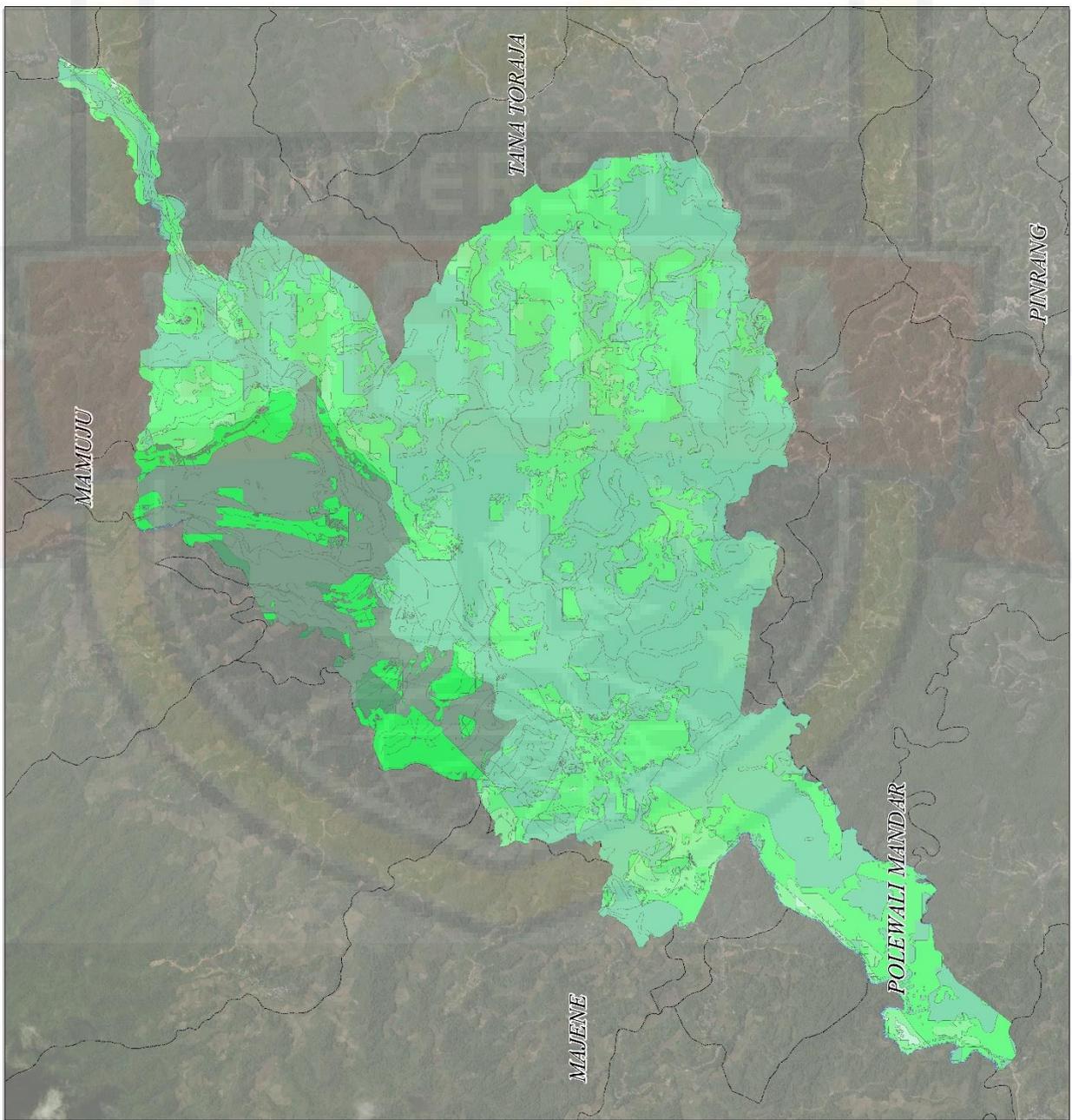
- Kesesuaian Lahan Sangat Rendah Dan LP2B
- Kesesuaian Lahan Rendah Dan NON-LP2B
- Kesesuaian Lahan Rendah Dan LP2B
- Kesesuaian Lahan Sedang Dan NON-LP2B
- Kesesuaian Lahan Sedang Dan LP2B
- Kesesuaian Lahan Agak Tinggi Dan NON-LP2B
- Kesesuaian Lahan Agak Tinggi Dan LP2B
- Kesesuaian Lahan Agak Tinggi Dan NON-LP2B

SUMBER
 1. PETA MAMASA
 2. PIRSE ANALISIS PERHUK. 2022

DOSEN PEMBIMBING
 Dr. S. Kamran Akbar, ST, MT
 Ir. Itham Yalaya, ST, MT

JUDUL PETA
KESESUAIAN LAHAN DAN LP2B

Mahasiswa
 BRYAN YUDHA OCTA PRATAMA



Gambar 4. 24 Peta Kesesuaian Lahan LP2B Kawasan Perkotaan Mamasa

D. ANALISIS PENENTUAN ARAHAN PENGENDALIAN RUANG DARI KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN

Untuk menjawab arahan pengendalian ruang dari hasil analisis kesesuaian lahan pertanian, menggunakan alat analisis Sistem Informasi Geospasial dengan meng-overlay peta hasil analisis kesesuaian lahan pertanian dengan peta pola ruang RTRW Kabupaten Mamasa. Lalu dilakukan analisis kebijakan dengan kebijakan LP2B. Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. 24 Matriks Perbandingan

Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang Kabupaten Mamasa	Status	Luas (Ha)	Arahan
Tanaman Setahun (Kesesuaian Agak Tinggi)	Hortikultura	NON-LP2B	0,425	Peningkatan Teknologi serta Kualitas dibidang Pengembangan Hortikultura
	Hortikultura	LP2B	20,623	Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini Alih Fungsi Lahan Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.
		NON-LP2B	212,013	Pengembangan komoditi Hortikultura Untuk Peningkatkan Produksi Tanaman. Pengembangan Kawasan hortikultura melalui sistem dan usaha agribisnis
	IPAM	NON-LP2B	0,273	Pembatasan aktivitas yang mengancam pencemaran lingkungan

Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang Kabupaten Mamasa	Status	Luas (Ha)	Arahan
	Jalan	LP2B	2,63	Membatasi radius pengembangan kawasan pertanian dan non Pertanian
		NON-LP2B	19,17	Peningkatan Jaringan Jalan
	Kawasan Peruntukan Industri	LP2B	0,027	Tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini
	Pariwisata	NON-LP2B	1,976	Pembangunan Kawasan wisata agropolitan. Membatasi kegiatan wisata yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
	Perdagangan dan Jasa	LP2B	0,085	Tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini
		NON-LP2B	7,589	Pengendalian alih fungsi Kawasan pertanian Membatasi radius pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa
	Perikanan	NON-LP2B	0,571	Peningkatan RTH dan Penghijauan serta peningkatan budidaya perikanan
	Perkantoran	LP2B	0,275	Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini
		NON-LP2B	6,594	Pengendalian alih fungsi Kawasan perkantoran Pembatasan KDB pada Kawasan daya dukung kemampuan lahan sedang dan rendah Membatasi radius Pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa
	Perkebunan	LP2B	33,088	Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini

Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang Kabupaten Mamasa	Status	Luas (Ha)	Arahan
		NON-LP2B	500,45	Pengembangan komoditi perkebunan rakyat
				Pengembangan Kawasan perkebunan melalui sistem dan usaha agribisnis dan pengembangan Kawasan industri masyarakat perkebunan
	Permukiman	LP2B	44,205	Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini
		NON-LP2B	182,093	Pengendalian alih fungsi Kawasan permukiman
				Pembatasan KDB pada Kawasan daya dukung kemampuan lahan sedang dan rendah
			Membatasi radius Pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa	
	Persampahan	NON-LP2B	0,035	Pembatasan Aktifitas disekitar Kawasan TPA
	Pertahanan dan Keamanan	LP2B	2,573	Peningkatan RTH dan Penghijauan
				Penanaman Vegetasi di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan
		NON-LP2B	1,819	Pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian
	Membatasi Pembangunan di Kawasan Pertanian yang berpotensi tinggi.			
	Peternakan	LP2B	0,353	Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini
		NON-LP2B	0,281	Peningkatan RTH dan Penghijauan di sekitar Kawasan Peternakan
	Pengolahan Persampahan	LP2B	0,029	Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini
NON-LP2B		0,478	Pembatasan Aktifitas disekitar Kawasan TPA	

Kesesuaian Tata Ruang Pertanian	Pola Ruang Kabupaten Mamasa	Status	Luas (Ha)	Arahan
	RTH	LP2B	0,232	Pengendalian dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
		NON-LP2B	4,704	Penghijauan di Kawasan Non LP2B untuk pemenuhan Kebutuhan RTH Kawasan Perkotaan
	RTNH	NON-LP2B	0,391	Penanaman Vegetasi di sekitar Kawasan RTNH
	Sempadan	LP2B	3,573	Penghijauan Daerah di sekitar sempadan
		NON-LP2B	11,141	Pemeliharaan dan Pembatasan aktivitas di sekitar sempadan
	SPU	LP2B	2,047	Tidak di perbolehkannya alih fungsi lahan Pertanian di Kawasan Ini
		NON-LP2B	12,802	Membatasi kegiatan SPU yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
	Tanaman Pangan	LP2B	138,126	Perlindungan Kawasan pertanian dari alih fungsi Lahan
				Meminimalisir alih fungsi lahan Kawasan pertanian yang berstatus LP2B dan mempertahankan lahan baku sawah.
			Rehabilitasi irigasi pada Kawasan LP2B	
		NON-LP2B	290,222	Meningkatkan saluran irigasi Meningkatkan teknologi di bidang pertanian
	Transportasi	NON-LP2B	0,863	Penanaman Vegetasi di sekitar Kawasan Transportasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian lahan pertanian di Kawasan Perkotaan Mamasa yaitu tanaman setahun dengan luas **1538,36 Ha**.
2. Konsep pengendalian kesesuaian lahan pertanian tanaman setahun ataupun tanaman tahunan dengan peruntukan rencana pola ruang kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan, kawasan industri, , kawasan pariwisata, budidaya perikanan yang berstatus Non LP2B diarahkan untuk membatasi aktivitas, radius kegiatan, dan pengendalian limbah yang mengancam kegiatan pertanian. Adapun untuk kesesuaian lahan pertanian dengan rencana pola ruang Non Pertanian dengan status LP2B diarahkan agar tidak diperbolehkannya alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada kawasan ini.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, kebijakan rencana Tata Ruang Wilayah perlu di pertegas agar dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
2. Bagi masyarakat terkhusus pada petani memberikan penyuluhan tentang pentingnya lahan pertanian perlu untuk ditingkatkan untuk mempertahankan produktifiitas agar hasil produksi yang diperoleh semakin banyak, dan dapat meningkatkan pendapatan para petani, dan ikut menyukseskan program ketahanan pangan.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Maka pada penelitian selanjutnya disarankan untuk pengambilan data yang lebih akurat dan memperdalam kembali mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dan arahan pengendalian yang dapat diterapkan terhadap alih fungsi lahan kawasan pertanian .

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah & Air* (2 ed.). IPB Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Sulawesi Barat dalam Angka 2022. Mamuju: Badan Pusat Statistik
- Barlowe, R. (1978). *Land Resource Economics*. Michigan State University, Pretince Hall.
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3 ed.). PT. Pustaka Pelajar.
- Food and Agriculture Organization. (1995). *FRA 1995 | Global Forest Resources Assessments | Food and Agriculture Organization of the United Nations*. <https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-1995/en/>
- Fuady, Z., Satriawan, H., & Mayani, N. (2015). Aliran Permukaan, Erosi dan Hara Sedimen Akibat Tindakan Konservasi Tanah Vegetatif pada Kelapa Sawit. *Sains Tanah - Journal of Soil Science and Agroclimatology*, 11(2), Art. 2. <https://doi.org/10.15608/stjssa.v11i2.225>
- Hapsari, B., Awaluddin, M., & Yuwono, B. D. (2014). Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Pertanian Berbasis Sistem Informasi Geografis Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Set (Studi Kasus: Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Geodesi UNDIP*, 3(1), Art. 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/4726>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hidayat, S. I., & Rofiqoh, L. L. (2020). ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.26418/j.sea.v9i1.40646>
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2007). Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (No. 20 Tahun 2007). Kementerian Pekerjaan Umum: Indonesia
- Kustiawan, I. (1997). *Konversi lahan pertanian di Pantai Utara Jawa*.
- Kuznets, S. (1961). *Economic Growth and the Contribution of Agriculture: Notes on Measurement*. <https://doi.org/10.22004/AG.ECON.209625>

- Lestari, T. (2009, April 22). Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. *Kolokium Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor*.
<https://kolokiumkpmipb.wordpress.com/2009/04/22/dampak-konversi-lahan-pertanian-bagi-taraf-hidup-petani/>
- Malthus, T. (1798). *An Essay on The Principle of Population*. Oxford World's Classics
- Marinda, R., R.P. Sitorus, S., & Pribadi, D. O. (2020). ANALISIS POLA SPASIAL PERSEBARAN KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG. *JURNAL GEOGRAFI*, 12(02), 161.
<https://doi.org/10.24114/jg.v12i02.17646>
- Masrukhin, M. (2019). PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF ALIH FUNGSI LAHAN DI KABUPATEN CIREBON. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.2598>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23 ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sumaryanto, T. S. (2005). Pemahaman dampak negatif konversi lahan sawah sebagai landasan perumusan strategi pengendaliannya. *Di dalam: Sunito S, Purwandari H, Mardiyarningsih DI, editor. Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*, 22–32
- Undra, V. L. (2019). IDENTIFIKASI PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KONTUKOWUNA. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(2).
<https://doi.org/10.36709/jppg.v4i2.6988>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (No. 41 Tahun 2009)*. Sekretariat Negara: Indonesia

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Briyan Yudha Octa Pratama lahir di Pare - pare, 14 Oktober 2000, merupakan Putra Pertama dari lima bersaudara pasangan dari Lewi, S.Pd, M.Pd, MM, dan Tabita. Beralamat di Jl. Poros Polewali – Mamasa, Kelurahan Sumarorong, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa.

Dengan riwayat pendidikan yakni Sekolah Dasar Negeri 003 Nosu (Tahun 2006-2012). Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nosu (Tahun 2012-2015). Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sumarorong (Tahun 2015-2018). Melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta Universitas Bosowa Makassar melalui jalur regular dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Penulis juga aktif dalam organisasi Kesatuan Mahasiswa Kabupaten Mamasa (KMKM) Komisariat Universitas Bosowa sebagai pengurus, periode 2019 – 2020 sebagai Koordiantor Bidang Hubungan Masyarakat. Penulis juga aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Elim 45 Unibos sebagai pengurus yang membidangi Minat dan Bakat, masa bakti 2020 – 2021.